IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MEMPROMOSIKAN BUDAYA PACU JALUR

Oleh: FAIZAL AMRI 187321003

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama

: FAIZAL AMRI

NPM

: 187321003

Kekhususan

: Magister Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis

: Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan

Budaya Pacu Jalur

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari

: Senin

Tanggal

: 13 Juli 2020

Pukul

: 10.00 – 11.00 Wib

Dan dinyatakan LULUS PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si.

Anggota II

nggota l

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Dr. H. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

Dokumen ini adalah Arsip Milik: oustakaan Universitas Islam Ri:

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MEMPROMOSIKAN BUDAYA PACU JALUR

Oleh:

Nama

: FAIZAL AMRI

NPM

: 187321003

Program Studi

: Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui

Oleh Dosen Pembimbing untuk diujiankan

Pembimbing I

Tanggal. 24 JUL 1 2020

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pembimbing II

Tanggal. 24-7-2424

Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Riau

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

ii

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR: 321/KPTS/PPs-UIR/2020

TENTANG

PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

mbang

- : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 - Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim Penguji ujian seminar Proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
 - Bahwa nama nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
 - Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
- Peraturan Universitas Islam Riau Nomor: 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

ematikan : Surat Permohonan perubahan judul tesis dari saudara Faizal Amri tanggal 13 Juli 2020 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 15 November 2019.

MEMUTUSKAN

ankan : 1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai	
1	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing I	
2	Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing II	

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa:

FAIZAL AMRI Nama : 18 732 1003 NPM

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

"KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Judul Tesis Lama:

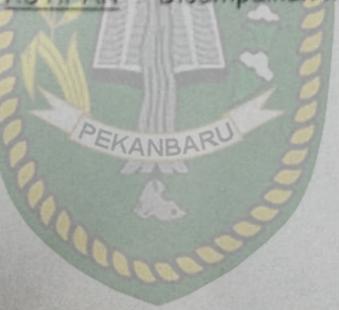
KUANTAN SINGINGI DALAM MEMPROMOSIKAN BUDAYA PACU JALUR"

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH Judul Tesis Baru:

DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MEMPROMOSIKAN BUDAYA PACU

JALUR"

- Tugas tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
- Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
- Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
- Mencabos Sks Direktur sebelumnya NOMOR: 325/KPTS/PPS-UIR/2019 tertanggal 08 Juli 2019 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali. KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



PEKANBARU ETAPKAN DI TAS APAGA TANGGAL: 14 2020 Juli Or. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. PASCA SA 1954080819870110029

sampaikan Kepada ersitas Islam Riau di Pekanbaru ogram Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru





UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAIZAL AMRI

NPM : 187321003

Jurusan : Ilmu Pemerintahan Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam

Mempromosikan Budaya Pacu Jalur.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.

Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaaan sadar dengan sebenar – benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang belaku di Universitas Islam Riau.









PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 010/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama

: Faizal Amri

NPM

: 187321003

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 7 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Pemerintahan

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.Ip., M.A.

Lampiran: Turnitin Originality Report Pekanbaru, 8 Juli 2020

Staf Perpustakaan

Turnitin Originality Report IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MEMPROMOSIKAN BUDAYA by Faizat Amii PACU JALUR From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2) Processed on 07-Jul-2020 16:48 +08 · ID: 1354501681 · Word Count, 23229 Similarity Index Similarity by Source Internet Sources: 25% Publications. Student Papers: 13% sources: 3% match (Internet from 12-Jun-2020) https://id.123dok.com/document/4zpx384q-analisis-manajemen-kawasan-persiapan-objekwisata-ekologi-taman-hutan-monyet-di-teluk-betung-utara.html 3% match (Internet from 28-Sep-2018) 2 http://eprints.umm.ac.id/37518/4/jiptummpp-gdl-hartono201-50981-3-babii.pdf 2% match (Internet from 18-May-2020) 3 https://keuangan.co/isi/judul/Ontologi Ilmu Pemerintahan 2% match (student papers from 08-Aug-2019) Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-08-08 2% match (Internet from 27-Jul-2019) 5 http://diplomatmuda.com/wonderful-indonesia-calendar-of-event/ 2% match () 6 http://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/view/776 1% match (student papers from 09-Mar-2020) 7 Submitted to Southeast Community College on 2020-03-09 1% match (Internet from 02-Jun-2017) 8 http://eprints.uny.ac.id/26957/1/Linda%20lrawati.pdf 1% match (Internet from 04-Apr-2019) 9 http://dastydewany.blogspot.com/2012/ 1% match (Internet from 31-Jan-2016) 10 http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12710/SKRIPSI%20CD.pdf? sequence=1 1% match (student papers from 26-Jun-2020) Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya on 2020-06-26 1% match (student papers from 05-May-2020) 12 Submitted to School of Business and Management ITB on 2020-05-05 1% match (Internet from 23-Jan-2020) 13 https://dpmptsptk.kuansing.go.id/id/page/profit-kuantan-singingi.html 1% match (Internet from 06-Apr-2020) https://kuansing.go.id/id/page/visi-dan-misi.html 1% match (Internet from 06-Jul-2020) http://barta1.com/2019/01/16/sulut-punya-3-calender-of-event-2019-di-mana-saja/

1% match (Internet from 28-Mar-2020)

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp06ec0f4bd1full.pdf

16

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada:

Allah SWT yang telah memberikan segala rahmatNya kepada hamba sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Sholawat beriring salam untuk junjungan nabi besar Muhammad SAW semoga kelak kita mendapat syafaat dariNya.

Karya ini juga untuk kedua Orang Tua, Istri dan Anak tercinta serta untuk seluruh keluarga yang telah mendukung saya selama ini baik dalam suka maupun duka dan memanjatkan do'a untuk kelancaran dan keselamatan saya dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Riau. Tidak lupa juga buat teman – teman yang selalu menolong dan mensuport saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

"Terima Kasih"



LEMBAR TUNJUK AJAR

Pakaian Pemimpin

"Lurus dan Jujur"

Yang dikatakan pemimpin :
Berkata lurus bercakap benar
Lurusnya tahan dibidik
Benarnya menahan asak
Lurus hatinya lurus akal
Lurus niat lurus buat

Lurus lidah lurus tingkah
Lurus lahir lurus bathinnya
Benar berdiri di jalan Allah
Benar tegak menurut adat
Benar berjalan menurut hukum
Benar melangkah pada undang
Benar tidak alih beralih.



BIODATA

Nama : FAIZAL AMRI

Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 28 Februari 1981

Jenis Kelamin : Laki - laki

Agama : Islam

Pekerjaan : ASN

Nama Orang Tua

a. Ayah : MASDI

b. Ibu : GUSLIANI

Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN 026 Tanjung Pinang

b. SLTP : SMPN 5 Tanjung Pinang

c. SLTA : Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) Tanjung Pinang

d. S1 : STIE Riau Pekanbaru

No Hp : 0812-7565-114



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MEMPROMOSIKAN BUDAYA PACU JALUR

ABSTRAK

Oleh

FAIZAL AMRI

Sektor pariwisata dalam era globalisasi saat ini, telah menjadi salah satu industri terbesar dan terkuat di dunia, dimana pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pemasok pendapatan negara serta pendorong perekonomian masyarakat Sektor pariwisata merupakan sarana yang efektif untuk lebih mengenal, mempelajari dan mengetahui sutau Negara, masyarakat dan budayanya dimana peminat wisata lokal maupun asing yang berkunjung pada suatu daerah tujuan. salah satu kebudayaan yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat Kuantan Singingi adalah Pacu Jalur. Pacu Jalur adalah sejenis lomba dayung tradisional khas daerah Kuantan Singingi (Kuansing) yang hingga sekarang masih ada dan berkembang di Provinsi Riau. Lomba dayung ini menggunakan perahu yang terbuat dari kayu gelondongan yang oleh masyarakat sekitar juga sering disebut jalur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kabupaten Kebudayaan Pemerintah Daerah Kuantan Singingi Mempromosikan Budaya Pacu Jalur. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey deskriptif dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dengan Kepala Dinas Pariwisata sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data secara deskriptif menggunakan teknik induktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur kurang terlaksana berdasarkan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Mempromosikan, Budaya Pacu Jalur

IMPLEMENTATION OF TOURISM AND POLICY OF THE GOVERNMENT REGIONAL DISTRICT OF KUANTAN REGENCY IN PROMOTING PACU LANE CULTURE

ABSTRACT

By

FAIZAL AMRI

ERSITAS ISLAM

The tourism sector in the current era of globalization, has become one of the largest and most powerful industries in the world, where tourism is one of the biggest contributors in supplying state income and driving the community's economy. community and culture where local and foreign tourists who are interested in visiting a destination, one of the cultures that is still preserved by the Kuantan Singingi community is Pacu Path. Pacu Path is a kind of traditional rowing competition typical of the Kuantan Singingi (Kuansing) area which still exists today and is developing in Riau Province. This rowing competition uses a boat made from logs which the local community also often calls lane. The purpose of this study was to analyze the Policy Implementation of the Department of Tourism and Culture of the Kuantan Singingi District Government in Promoting Pathway Culture. The type of research used in this study is a descriptive survey with qualitative methods. There are 10 informants in this study with the Head of Tourism Office as the key informant. Data collection techniques with interviews and descriptive data analysis using inductive techniques. This study concludes that the Implementation of Tourism and Culture Service Policy of the Kuantan Singingi Regency Government in Promoting Pathway Culture is not implemented based on indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, Policy, Promoting, Pathway Culture

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian Tesis ini yang berjudul "Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur". Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang administrasi.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus — tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar — besarnya kepada:

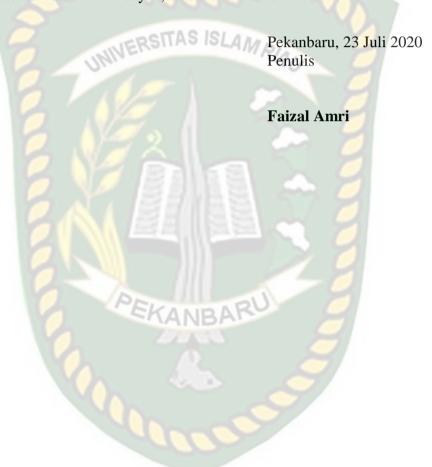
Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH,
 MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- 4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
- 5. Bapak Dr. H. Nurman, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
- 6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
- 7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.

8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang penulis peroleh berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	
PERSEMBAHAN	
TUNJUK AJAR	
BIODATA	
ABSTRAK	
ABSTRACTKATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABELDAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Id <mark>ent</mark> ifikas <mark>i Masal</mark> ah	
1.3. Rumusan Masalah	
1.4. B <mark>atasan Masalah</mark>	
1.5. Tujuan Penelitian	
1.6. Manfaat Penelitian	20
BAB II KAJI <mark>AN</mark> PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIK <mark>IR</mark> AN	22
2.1. Kajian Pustaka	22
2.1.1 Konsep Pemerintahan	
2.1.2 Konsep Ilmu Pemerintahan	28
2.1.3 Konsep Pemerintah Daerah	32
2.1.4 Konsep Kebijakan	34
2.1.5 Konsep Implementasi Kebijakan	39
2.1.6 Konsep Manajemen Pariwisata	44
2.1.7 Konsep Promosi	49
2.1.8 Konsep Pacu Jalur	54
2.2. Penelitian Terdahulu	56
2.3. Kerangka Pemikiran	59
2.4. Konsep Operasional	59

2.5. Operasionalisasi Variabel	62
BAB III METODE PENELITIAN	63
3.1. Tipe Penelitian	63
3.2. Lokasi Penelitian	63
3.3. Informan Penelitian	63
3.4. Teknik Penarikan Informan	64
3.5. Jenis dan Sumber Data	
3.6. Teknik Pengumpulan Data	66
3.6. Teknik Pengumpulan Data 3.7. Teknik Analisis Data 3.8. Jadwal dan Kagistan Panalitian	67
3.8. Jadwal dan Kegiatan Penelitian	67
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
4.1. Deskripsi Daerah Penelitian	
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Id <mark>ent</mark> itas Informan	86
5.2. Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur	
BAB VI PENUTUP	129
6.1. Kesimpulan	129
6.2. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	133

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman	
I.1	Jumlah Masyarakat yang Menonton Budaya Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Dari Tahun 2014-2018	7	
I.2	Daftar 100 Calender of Events 2018 dan 2019 yang dirilis oleh Kemenpar RI		
II.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang		
II.2	Operasionalisasi Variabel Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur	62	
III.1	Jumlah Informan Penelitian	64	
III.2	Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu		
IV.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi	73	
IV.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi	76	
V.1	Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin	86	
V.2	Distribusi Jumlah Informan Menurut Umur	87	
V.3	Distribusi Jumlah Informan Menurut Pendidikan	88	
V.4	Kerjasama Dinas Pariwisata dengan Instansi Terkait Dalam Upaya Peningkatan Promosi Wisata Budaya Pacu Jalur	96	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman

II.1 Kerangka Pikir Penelitian Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur

59



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi baik dari sektor pariwisata bahari, pariwisata alam, dan lain sebagainya. Letak geografis Indonesia yang mendukung keindahan alamnya serta banyaknya kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia inilah yang kemudian banyak menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Keindahan alam di suatu daerah merupakan nikmat Tuhan yang wajib dijaga kelestarian dan keindahannya agar karya Tuhan yang indah itu dapat dinikmati penerus generasi bangsa kita di kemudian hari.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan maksud agar daerah dapat menangani urusan pemerintah didasarkan tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Pemerintahan daerah diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai asas otonomi.

Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pariwisata untuk masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual masyarakat. Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Kepariwisataan sendiri selain memiliki fungsi untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual masyarakat juga memiliki fungsi lainnya yaitu untuk meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pariwisata dalam era globalisasi saat ini, telah menjadi salah satu industri terbesar dan terkuat di dunia, dimana pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pemasok pendapatan negara serta pendorong perekonomian masyarakat. Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang dilakukan dari suatu tempat ketempat lain dan dengan suatu perencanaan dengan tujuan semata-mata untuk menikmati kegiatan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009¹ Pasal 6 : Pengembangan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas

.

¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang mewujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pasal 8 ayat 1 Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk kepariwisataan nasional, pembangunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11: Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Pariwisata menurut Wahab² merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektorsektor produktivitas lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009³ Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah⁴. Dengan melakukan wisata manusia dapat sejenak melepas penat, lelah, dan menghilangkan stress.

² Wahab, Salah. 1996. Manajemen Kepariwisataan. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

³ Ibid

⁴ http://karyatulisilmiah.com/, diakses tanggal 28 April 2019, pukul 11.25 WIB.

Manfaat pariwisata dari segi ekonomi adalah dapat menghasilkan devisa yang besar sehingga meningkatkan perekonomian negara. Kontribusi pariwisata menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Manfaat lain yang muncul dari industri pariwisata antara lain yakni dapat terlihat dari segi budaya. Dengan pesatnya perkembangan pariwisata saat ini maka akan muncul pemahaman antar budaya melalui interaksi pengunjung wisata (turis) dengan masyarakat lokal dimana tempat daerah wisata tersebut berada. Dari interaksi inilah wisatawan dapat mengenal dan menghargai budaya masyarakat setempat serta memahami latar belakang kebudayaan lokal yang dianut oleh masyarakat sekitar.⁵

Akan tetapi, pada penyelenggara pariwisata di beberapa daerah/ objek wisata yang ada di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai atraksi yang menarik dan berstandar baik, karena potensi yang ada belum dikembangkan secara maksimal. Hal ini perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dan para pengelola objek wisata serta peran masyarakat dalam meningkatkan potensi wisata yang ada di daerah tersebut. banyak cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di daerah, salah satunya ialah dengan mempromosikan berbagai potensi yang dimiliki daerah kepada wisatawan baik domestic maupun mancanegara. Dalam kondisi global saat ini mengharuskan lembaga — lembaga yang menangani kepariwisataan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan turut memanfaatkannya

-

⁵ https://www.studioriau.com/, diakses tanggal 28 April 2019, pukul 11.34 WIB.

atau mengaplikasikannya yang akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan maupun perkembangan destinasi pariwisata.

Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam perekonomian Nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatkan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan Nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah.

Salah satu pengembang sektor pariwisata adalah Provinsi Riau, sebab selama ini di Riau dikenal sebagai penghasil tambang minyak bumi dan kebun sawit. Namun, saat ini minyak bumi sudah semakin menipis dan Riau harus berusaha meningkatkan pendapatan daerah selain dengan minyak bumi. Riau juga banyak menghasilkan bisnis di bidang property yakni seperti gedung, perumahan, ruko dan lain – lain. Oleh karena itu, Riau berusaha untuk meningkatkan sektor pariwisatanya sebagai sumber pemasukan utama daerahnya.

Sektor pariwisata merupakan sarana yang efektif untuk lebih mengenal, mempelajari dan mengetahui sutau Negara, masyarakat dan budayanya dimana peminat wisata lokal maupun asing yang berkunjung pada suatu daerah tujuan. Wisata memiliki motivasi untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam termasuk didalamnya cagar alam, tempat – tempat bersejarah, bangunan kuno dan lain – lain. Demikian halnya dengan adat istiadat, kebiasaan, upacara yang

sifatnya tradisional, keagamaan, kesenian daerah, semuanya merupakan daya tarik yang kuat bagi wisatawan nasional maupun internasional.

Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang dibentuk dari pemekaran Kabupaten INHU (Indragiri Hulu) yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999⁶, yang memiliki kekayaan budaya yang beragam serta kekayaan alam yang melimpah, salah satu kebudayaan yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat Kuantan Singingi adalah Pacu Jalur. Pacu Jalur adalah sejenis lomba dayung tradisional khas daerah Kuantan Singingi (Kuansing) yang hingga sekarang masih ada dan berkembang di Provinsi Riau. Lomba dayung ini menggunakan perahu yang terbuat dari kayu gelondongan yang oleh masyarakat sekitar juga sering disebut jalur. Upacara adat khas daerah Kuansing ini diselenggarakan setiap satu tahun sekali untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 23-26 Agustus, panjang perahu/jalur yang digunakan dalam lomba ini berkisar antara 25-40 meter dengan jumlah atlet 40-60 orang tiap perahu. Biasanya, Event ini diikuti oleh ratusan perahu dan melibatkan ribuan atlet dayung, serta dikunjungi oleh ratusan ribu penonton baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Adapun jumlah pengunjung lomba Pacu Jalur pada Kabupaten Kuantan Singingi dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

_

⁶ Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Tabel I.1 Jumlah Masyarakat yang Menonton Budaya Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Dari Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Pengunjung	Jumlah peningkatan pengunjung	Persentase peningkatan Pengunjung
1	2014	215.650	0	0%
2	2015	267.500	51,850	24%
3	2016	303.500	36,000	13,5%
4	2017	350.000	46,500	15,3%
5	2018	463.500	113,500	32,4%
6	2019	500.250	36,750	7,9%
	Jumla <mark>h</mark>	2,100,400	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan wisata dengan motif wisata budaya yaitu Pacu Jalur. Terlihat dari tahun 2014 wisatawan yang berkunjung mulai menikmati wisata budaya selalu mengalami peningkatan jumlah pengunjung, hal ini menunjukkan antusiasme yang cukup besar dari wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata budaya dan diterima oleh wisatawan sehingga mereka selalu melakukan perjalanan wisata budaya setiap tahunnya.

Lomba pacu jalur mengandung kearifan lokal bisa menjadi modal sosial dalam membangun perekonomian. *Multiplayer* efeknya luar biasa hingga pedagang luar kota datang membuka lapak karena banyaknya pengunjung yang menjadi konsumen, restoran dengan sajian produk makanan setempat dan penginapan yang penuh.

Kegiatan lomba dayung ini merupakan warisan budaya masyarakat Kuantan Singingi yang telah berlangsung sejak tahun 1990an. Perahu atau jalur dahulu sering dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sarana transportasi untuk mengangkut hasil bumi ataupun hasil hutan. Kebiasaan menggunakan perahu inilah yang mungkin merupakan cikal bakal kegiatan Pacu Jalur. Pada zaman penjajahan Belanda, Pacu Jalur juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Belanda untuk memperingati serta memeriahkan hari ulang tahun ratu mereka yang bernama Ratu Wihelmina.

Semenjak Indonesia merdeka, Pacu Jalur berangsur – angsur dijadikan upacara khas untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya, kegiatan Pacu Jalur hanya diikuti oleh segelintir masyarakat disekitar daerah Kuantan Singingi. Dalam perkembangannya, kegiatan ini banyak mendapat perhatian dan simpati dari berbagai kawasan, terutama kawasan Riau dan sekitarnya serta mancanegara. Oleh karena itu, saat ini event Pacu Jalur tidak hanya milik masyarakat Kuantan Singingi saja, melainkan telah menjadi pesta rakyat milik masyarakat Riau dan kawasan sekitarnya. Festival yang bernuansa tradisional ini telah ditetapkan masuk kedalam Kalender Pariwisata Nasional (*Major Event*).

Bentuk kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2002 sampai sekarang dalam mempromosikan budaya Pacu Jalur kepada calon wisatawan lokal maupun mancanegara meliputi penggunaan media cetak, elektronik dan media on-line, penggunaan media cetak, Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Riau Pos sedangkan penggunaan media elektronik bekerjasama dengan Riau Televisi (RTv), dua media ini di fokuskan kepada calon wisatawan lokal. Dalam hal ini publikasi budaya Pacu Jalur kepada calon wisatawan di luar pulau sumatera dan

mancanegara dengan menggunakan media on-line yang bertujuan menginformasikan akan keberadaan event budaya tahunan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan web resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, seluruh kegiatan promosi dilakukan oleh seksi promosi dan pemasaran pariwisata.

Keunikan serta keserasian suasana pacu jalur di Kuantan Singingi dengan alam sekitarnya yang dapat dirasakan dan mampu menarik wisatawan terbukti dari jumlah kunjungan wisatawan yang cukup tinggi. Perlu diketahui bahwa selain sebagai event olahraga yang banyak menyedot perhatian masyarakat, tradisi pacu jalur juga melibatkan hal — hal yang berbau magis. Festival pacu jalur dalam wujudnya memang merupakan hasil budaya dan karya seni khas yang merupakan perpaduan antara unsur olahraga, seni dan olah bathin. Namun, masyarakat sekitar sangat percaya bahwa yang banyak menentukan kemenangan dalam perlombaan ini adalah olah batin dari pawang perahu atau dukun perahu disamping kekuatan otot pendayungnya.

Biasanya sebelum pacu jalur dimulai diawali dengan upacara sakral dan magis oleh Pawang Jalur. Bila diamati banyak hal yang unik dan menarik yang terdapat pada sebuah jalur dan pada pacu jalur ini, seperti ada patuo, dukun jalur, anak jalur. Adapun yang dimaksud dengan patuo jalur ini adalah orang yang dituakan, dipercaya atau mungkin tepatnya pada masa sekarang manager, yang bertugas mencari, memilih dan menentukan kayu jalur, menentukan tukang dan tenaga bantuan dari masyarakat, menentukan dukun jalur, mengadakan rapat – rapat tentang jalur, mengatur kepentingan tukang jalur selama bekerja di hutan

dan penyelesaian pekerjaan lainnya, mengurus kepentingan anak jalur, mengurus kepentingan dukun jalur dalam upacara jalur⁷.

Dukun jalur adalah orang yang dipercaya mempunyai ilmu batin yang nantinya akan memanterai jalur dan anak pacu jalur agar terhindar dari segala marabahaya selama berpacu, kebanyakan setiap jalur mempunyai satu orang dukun walau kadang ada yang lebih. Tugas dukun adalah memberi masukan tentang penentuan dan memilih kayu jalur pada panto, memimpin upacara menobang jalur, menentukan langkah jalur, seperti waktu maelo, waktu turun ke batang kuantan, waktu berangkat ke tempat pacu dan lainnya, menawari jalur seperti membacakan matera, memberikan ramalan — ramalan mengenai jalur, hal ini mengenai ramalan — ramalan mengenai lawan yang akan dihadapi bahkan ramalan jalur mana yang akan berhasil mencapai pemenang pertama, mempersiapkan anak jalur termasuk memberikan motivasi dan semangat.

Mengingat kayu itu berasal dari pohon besar yang usianya ratusan tahun. Maka kayu tersebut memiliki mambang atau penunggu kayu. Hanya orang – orang yang memiliki ilmu kebatinan lah yang bisa melakukan menaklukkan mambang tersebut, tidak sembarang orang⁸. Menariknya masyarakat Kuansing sendiri meyakini betul bahwasanya terjadinya kekacauan dari anak – anak pacu dalam menggayuh dayungnya, atau karamnya jalur yang dikendalikan, sakit perut satu atau dua orang anak pacu sebelum berlomba, itu disebabkan oleh peranan dukun jalur lawan. Maka si dukunlah yang mengetahui bagaimana cara untuk menaklukan kayu itu hingga ia bisa dijadikan jalur. Setelah dijadikan jalur, dari

.

⁷ Hamidy, Kesenian Jalur di Rantau Kuantan (Pekanbaru: Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau, 2005) hlm.39-40.

⁸ Ibid hlm 40

sudut pandang si dukun, kayu itu tetap hidup dan si dukun lah yang tahu bagaimana jalur itu bisa kencang dan itu pula sebabnya segala prosesi yang berkaitan dengan jalur itu mulai dari mencari, membuat, dan melepas jalur ke arena pacuan, peranan sang dukun sangat menentukan.

Banyak faktor yang memengaruhi jalur bisa menjadi pemenang. Peranan anak pacu dalam keserasian mendayung, jalur itu sendiri dan peranan dukun pacu. Dukun jalur itu sudah berperanan sejak mulai dari memilih kayu yang akan dijadikan jalur hingga ke arena pacuan. Dukun jalur yang akan memberikan instruksi kapan waktu akan berangkat dari kandang (tempat daerah mereka menuju arena pacuan). Kapan berangkat dari tempat parkir jalur menuju garis start. Untuk berangkat ke pancang pertama garis start harus tepat pelangkahannya.

Untuk itulah sebelum turun berpacu seorang dukun akan menentukan kapan turun ke kandang, dan kapan menuju ke garis start. Sebelum berangkat ke garis start ada hal – hal yang mesti dilakukan dukun. Di antaranya ritual dengan menyiapkan limau purut, bunga tujuh warna dengan kemenyan yang dikemudian dimantra-mantrai ke jalur. Tujuannya adalah agar jalur tetap stabil dan anak pacu dalam kondisi yang baik selama lomba. Dan si dukun jalur juga mengetahui dan bisa memprediksi apakah jalur yang ditukanginya bisa menang. Hal ini kembali bergantung kepada kuat atau tidaknya mambang yang dimiliki jalur dan kehebatan dukun jalur lawan.

Mengingat promosi sangat penting dalam pemasaran pariwisata, maka penelitian tentang promosi pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan sebelum, selama dan setelah promosi sehingga dapat dilihat efektifitas promosi yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini dipergunakan untuk menentukan target audience atau calon wisatawan, mengetahui informasi – informasi pariwisata yang dibutuhkan oleh para wisatawan, dan mengevaluasi keberhasilan promosi yang sedang dilakukan dan setelah selesai dilakukan.

Promosi pariwisata yang efektif mencakup pengidentifikasian target calon wisatawan yang akan dicapai pengidentifikasian tujuan komunikasi yang akan dicapai, formulasi bentuk mencapai tujuan, pilihan media untuk menyampaikan pesan dan informasi secara efektif kepada calon wisatawan yang dituju, alokasi anggaran untuk mencapai produksi dan penyampaian pesan, dan evaluasi mekanisme penjualan jasa dan produk – produk pariwisata.

Peranan dari lembaga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sangatlah penting untuk mempromosikan dan pengembangan pariwisata terutama Pacu Jalur. Kegiatan pacu jalur tertuang di dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi. Serta diturunkan dalam Keputusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 303/Kpts-I/DPK/2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019. Adapun jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 untuk menjalankan program pengembangan pemasaran pariwisata dengan cara meningkatkan promosi pariwisata daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
- 2. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
- 3. Koordinasi dengan faktor pendukung pariwisata

- 4. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar Negeri.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan promosi wisata
- 6. Pelatihan pemandu wisata terpadu
- 7. Penunjang event pacu jalur
- 8. Pameran gebyar nusantara
- 9. Peningkatan SDM Pariwisata dalam rangka singkronasi program kerja antara pusat dan daerah
- 10. Pembuatan papan informasi pariwisata Kab/Provinsi.
- 11. Launching pariwisata. (Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019).

Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melestarikan dan mengembangkan Wisata Budaya Pacu Jalur sebagai ikon wisata terbesar di Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul "Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh penulis didapati beberapa masalah yang menjadi dasar penelitian ini yaitu:

 Event Budaya pacu jalur merupakan event budaya yang besar dan sudah dikenal lama bahkan sudah berusia lebih dari satu abad serta sudah dilaksanakan secara turun temurun, dahulunya event pacu jalur termasuk dalam kalender pariwisata yang dirilis oleh Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, namun saat ini event pacu jalur tidak lagi tercantum dalam kalender pariwisata nasional pada tahun 2019, seperti yang terlihat pada kalender pariwisata dibawah ini :

Tabel I.2 Daftar 100 Calender of Events 2018 dan 2019 yang dirilis oleh Kemenpar RI

	Kemenpar RI	
No	Event Tahun 2018	Event Ta <mark>hun</mark> 2019
1	2	3
1	Fest in fest, 19-21 Januari. Jakarta	Cap Go Meh, Kalimantan Barat 5-19 Februari
2	Festival pulau penyengat Kepulauan Riau, 14-18 Februari	Festival Pulau Penyengat, Kepulauan Riau 14-18 Februari
3	Festival Baunyale, Nusa tenggara barat, 20 Februari	Pesona Bau Nyale, Nusa Tenggara Barat 20 Februari
4	Cap Go meh singkawang, Kalimantan barat, 3 Maret	Java Jazz, DKI Jakarta, 1-3 Maret
5	Festival komodo, NTT, 5-10 Maret	Horas Samosir Fiesta, Sumatera Utara, 7 Maret
6	Pekan <mark>Raya Sumater</mark> a Utara, 16 Maret – <mark>16 April</mark>	Bali Spirit Festival, Bali, 23-31 Maret
7	Tour De Bintan, Kepulauan Riau, 24-25 Maret	Exciting Banten on Seba Baduy, Banten, 24-31 maret
8	Festival Tidore East-West Worl Monument, 29 Maret – 12 April	Bangka Culture Wave, Kepulauan Bangka Belitung 24 maret – 5 april
9	Legu Gam, Keraton Ternate Maluku Utara, 28 Maret – 13 April	Tour de Bintan, Kepulauan Riau, 29-31 maret
10	Bali Spirit Festival, 2-8 April	Festival Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, 1-10 April
11	Coming Home Festival, Bangka Belitung, 4-5 April	Majapahit Travel Fair, Jawa Timur, 11 – 14 April
12	Jakarta Fashion and Food Festival, 5-6 April	Krui World Surfing League, Lampung, 15-20 April
13	Festival Tambora, NTB, 9-11 April	Gebyar Pesona Budaya Garut, Jawa Barat, 20-21 April
14	Halo Sultra, Sulawesi Tenggara 23-27 April	Ziarah Kubro, Sumatera Selatan, 26-28 April
15	Exciting Banten Festival (Seba Badui), Banten, 30 April.	The 20th Majapahit International Travel Fair, Jawa Timur 2-5 Mei
16	Festival Teluk Jailolo, 3-5 Mei	Pesona Khazanah Ramadhan, Nusa Tenggara Barat, 10-28 Mei

Mulang,

3

Isen

Budaya

Kalimantan Tengah 18-24 Mei

Festival

		Kalimantan Tengah 18-24 Mei
18	Art Jog, Yogyakarta, 4 Mei – 4	Asia Afrika Festival, Jawa Barat, 19
	Juni	Mei
19	Tour de Flores, NTT, 6-16 Mei	Festival Parade Pesona Kebangsaan,
		Nusa Tenggara Timur, 20 mei-5 Juni
20	Bintan Triathlon, Kepulauan Riau,	Pesta Kesenian Bali, Bali, 15 juni – 13
	11-13 Mei	juli
21	Asia Afrika Karnaval, Jakarta 13	Bintan Triathlon, Kepulauan Riau 7-9
	Mei	juni
22	Festival Budaya Iseng Mulang,	Jakarnaval, DKI Jakarta, 16 Juni
	Kalimantan Tengah, 19-24 Mei	SLANG
23	Pekan raya Jakarta, 5 Juni – 15	Festival Sriwijaya XXVIII 2019,
	Juli	Sumatera Selatan, 16-23 Juni
24	Festival tenganan, 7-8 Juni	Yadnya Kasada Bromo, Jawa Timur,
		17-19 Juni
25	Festival Pesona Budaya Asmat,	Festival Teluk Jailolo, Maluku Utara,
	Papua, 19-23 Juni	24-29 Juni
26	Bakar Tongkang, Riau, 28-30 Juni	Festival Bakar Tongkang, Riau, 28-30
		Juni
27	Yadnya Kasada dan Bromo	Festival Biak Munara Wampasi,
	Exotica, Jawa Timur, 29-30 Juni	Papua, 1-6 Juli
28	Biak <mark>Munara Wam</mark> pasi, Papua	Aceh Culinary Festival, Aceh, 5-7 Juli
	Barat, 1 <mark>-4 Juli</mark>	
29	1	Toraja International Festival, Sulawesi
		Selatan, 5-8 Juli
30		Festival Parade 1001 Kuda
	Juli	Sandelwood dan Tenun Ikat, Nusa
2.1		Tenggara Timur, 5 – 12 juli
31		Festival Babukung, Kalimantan
22		Tengah, 17 juli
52		Festival Bumi Rafflesia, Bengkulu,
		18-22 juli
22		Minor Al Carli Lavas David 20 Inl
33		Mizan Al Sufi, Jawa Barat, 20 Juli
24		Tonob Lot Arts Fostival Dali 20 inli
34		Tanah Lot Arts Festival, Bali, 20 juli
25		Tobooli City on Eine See: 4
33		Toboali City on Fire Sesi 4,
	Juli	Kepulauan Bangka Belitung, 25-28 Juli
36	Factival hulalana Rali 2.6	ARTJOG, D.I Yogyakarta 25 Juli – 25
30	<u> </u>	Agustus
37	Š	Solo Batik Carnival, Jawa Tengah, 26-
31	rarade Sanderwood dan Tenun	Solo Datik Callival, Jawa Tengan, 20-
	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Juni Tour de Flores, NTT, 6-16 Mei Dintan Triathlon, Kepulauan Riau, 11-13 Mei Asia Afrika Karnaval, Jakarta 13 Mei Festival Budaya Iseng Mulang, Kalimantan Tengah, 19-24 Mei Pekan raya Jakarta, 5 Juni — 15 Juli Festival tenganan, 7-8 Juni Festival Pesona Budaya Asmat, Papua, 19-23 Juni Bakar Tongkang, Riau, 28-30 Juni Yadnya Kasada dan Bromo Exotica, Jawa Timur, 29-30 Juni Raparat, 1-4 Juli Aceh Internasional Rapa'I festival, 12-15 Juli Al-mizan sufi music festival, 14 Juli Festival Lima Gunung, Jawa Tengah, 20-22 Juli Festival Lima Gunung, Jawa Tengah, 20-22 Juli Testival Lima Gunung, Jawa Tengah, 20-22 Juli Matasora World Music Festival, 21-22 Juli Matasora World Music Festival, 21-22 Juli Festial Pesona Bunaken, Sulawesi Utara 26-27 Juli Cheng Ho Festival Semarang, 29 Juli

Aceh Culinary Festival, 4-6 Mei

17

1	2	3
1	Ikat Sumba, NTT, 2-9 Agustus	28 juli
38	Dieng Culture Festival, Jawa	Festival Pesona Bunaken, Sulawesi
30	tengah, 3-5 Agustus	Utara, 26-29 Juli
39	Festival Pesona Lipuku, Sulteng,	Festival Cisadane, Banten, 27 juli – 3
	6-12 Agustus	agustus
40	Tomohon Flower Festival,	Banyuwangi Ethno Carnival, Jawa
10	Sulawesi Utara, 8-10 Agustus	Timur, 28 juli
41	Festival Lembah Baliem, Papua,	Jember Fashion Carnaval (JFC), Jawa
'1	8-10 Agustus	Timur, 30 Juli – 3 Agustus
42	Pagar alam heritage trail, sumsel,	Dieng Culture Festival, Jawa Tengah
1.2	8-11 Agustus	2-4 agustus
43	Sandeq Race Festival, Sulawesi	Buleleng Festival, Bali, 2-6 Agustus
	Barat, 11-17 Agustus	July 10 to 1 min 2 min 2 of 1 guistus
44	Internasional Angklung Festival	Festival Cheng Ho, Jawa Tengah, 3-4
	Kuningan, 17 Agustus	Agustus
45	Festival Teluk Ambon, Maluku,	Festival Morotai, Maluku Utara, 4-5
	17-20 Agustus	Agustus
46	Pesona Lombok, NTB, 18	Festival Budaya Lembah Baliem,
	Agustus – 16 September	Papua, 7-10 Agustus
47	Festival Sriwijaya, Sumatera	Tomohon International Flower
	Selatan, 22-27 Agustus	Festival, Sulawesi Utara, 7-12 Agustus
48	Festival Pasar Terapung	Polewali Mandar International Folk &
	Banjarmasin, Kalimantan Selatan,	Art Festival, Sulawesi Barat
	24-26 Agustus	Festival Sandeq Race 2019, Sulawesi
		Barat 7-13 Agustus
49	Festival Krakatau, Lampung, 24-	Jakarta Food & Fashion Festival, DKI
	26 Agustus	Jakarta 8 Agustus – 8 september
50	Festival Pacu Jalur, Riau 29	Pasa Harau Art & Culture Festival
	Agustus – 1 September	2019, Sumatera Barat, 9 – 11 Agustus
51	Tour De Singkarak, Sumbar, 5-14	Saman Gayo Alas Festival, Aceh 18
50	September	agustus Variandalara (Canada
52	Eight Festival Sulawesi Selatan,	Karnaval Kemerdekaan/Grand
	6-10 September	Karnaval Indonesia, DKI Jakarta 18
53	Malang Flower Carnival, 9	Agustus Fostival Taluk Amban, Maluku, 18 20
33	Malang Flower Carnival, 9 September	Festival Teluk Ambon, Maluku, 18-20 Agustus
54	Festival Moyo, NTB, 10	Lampung Krakatau Festival, Lampung
) -	September – 8 Oktober	23-25 Agustus
55	Festival Tabut Bengkulu, 10-20	Sanur Village Festival, Bali 21-25
	September	Agustus
56	Festival Tanjung Lesung, Banten,	Festival Budaya Wisata Pasar
	12-19 September	Terapung, Kalimantan Selatan, 23-25
		Agustus
57	Festival Phinisi, Sulawesi Selatan,	Pesona Festival Danau Tektonik Poso,
- '	of the first state of the state of	

1	2	3
		september – 27 Oktober
77	Festival Danau Sentarum, Kalbar, 27-29 Oktober	Musik Alam 2019, Kalimantan Utara, 28-29 september
78	Kemilau Madura, Jatim, 28-29 Oktober	Festival Likurai Timor, Nusa Tenggara Timur 1-6 Oktober
79	Jakarta Marathon, 28 Oktober	Festival Karnaval Karawo, Gorontalo, 6 oktober
80	Festival Mahakam, Kaltim, 2-4 November	Aceh International Diving Festival, Aceh 6-7 oktober
81	Kenduri seni melayu, kepri, 2-4 November	Festival Pesona Selat Lembeh, Sulawesi Utara 6-10 oktober
82	Pesta rakyat banda, Maluku, 4-11 November	Festival Seni Budaya Papua Barat, Papua Barat 7-11 oktober
83	International musi triboatton, sumsel, 7-11 November	Gandrung Sewu, Jawa Timur 12 oktober
84	Festival tempo doeloe, Jakarta, 10 November	Festival Keraton Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara 12-17 oktober
85	Wakatobi wonderful festival and EXPO wave, sulteng, 11-12 November	Festival Pesona Bahari Raja Ampat, Papua, 18-21 oktober
86	Bono surving, riau, 12-15 November	IronMan 70.3 Bintan , Kepulauan Riau 19-21 oktober
87	Festival tanjung kelayang, babel, 15-19 november	Jakarta Fashion Week, DKI Jakarta 19-25 oktober
88	Ya'ahowu nias festival, sumut, 16-20 November	Festival Danau Sentarum, Kalimantan Barat 23-25 oktober
89	Jogja international heritage walk, 17-18 november	Ubud Writers and Readers Festival, Bali 23-27 oktober
90	Gorontalo karnaval karawo, gorontalo, 20-25 November	Festival Takabonerate, Sulawesi Selatan 23-28 oktober
91	Festival budaya Cirebon, 21-28 November	Pesona Nusa Dua Fiesta 2019, Bali 25-27 Oktober
92	Borobudur writer and culture festival, 23-25 November	Festival Kerinci 2019, Jambi, 3-7 oktober
93	Festival budaya minangkabau, sumbar, 29 November – 2 desember	Jakarta Marathon, DKI Jakarta 27 oktober
94	Jogja Netpac Asia Film Festival, Yogyakarta, 1-8 Desember	Festival Pulo Dua, Sulawesi Tengah27 – 29 oktober
95	Festival danau toba, Sumut, 5-8 Desember	Festival Mahakam, Kalimantan Timur
96	Festival Nusa Penida, 7-9 Desember	Tour de Singkarak, Sumatera Barat
97	Batam International Culture	Festival Bekudo Bono, Riau

1	2	3
	Carnival, 8-9 Desember	
98	Lovely Desember Sulsel, 20-30	Iraw Tengkayu, Kalimantan Utara
	Desember.	
99		Festival Pesona Budaya Minangkabau,
		Sumatera Barat
100		Festival Budaya Cirebon, Jawa Barat

Sumber: Kominfo.go.id, diaksei pada Rabu 31 Juli 2019 pada 20.35 Wib.

Dari tabel diatas, terlihat dari 100 event pariwisata yang dilaksanakan, namun event budaya pacu jalur tidak lagi disebutkan diantara 100 event tersebut, mengingat dengan masuknya event pacu jalur kedalam kalender pariwisata merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam mempromosikan event pacu jalur tersebut

2. Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mempromosikan perlombaan pacu jalur masih perlu ditingkatkan lagi, terutama promosi yang dilakukan diluar Provinsi Riau dan Mancanegara. Mengingat pacu jalur itu sendiri merupakan event besar dengan memperebutkan Piala Menteri Pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan pengunjung yang datang menonton pacu jalur hanya berasal dari masyarakat dari provinsi Riau saja, belum banyak yang berasal dari luar provinsi Riau bahkan mancanegara, sementara pacu jalur merupakan event wisata budaya yang sudah turun temurun dan juga pernah mendapat penghargaan dinobatkannya pacu jalur sebagai pariwisata terpopuler di Indonesia di ajang Anugrah Pesona Indonesia pada tahun 2017.

1.3. Rumusan Masalah

Dengan diidentifikasinya beberapa masalah yang menjadi dasar penelitian ini berkaitan erat dengan Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam

mengembangkan dan mempromosikan wisata budaya pacu jalur di kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Budaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur?

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur. Peneliti membatasi permasalahan pada Wisata Budaya Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur.
- Untuk menganalisis hambatan dalam Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi inovasi dan inspirasi kepada aktor pengambil keputusan,

menjadi bahan ajar atau referensi dalam pengembangan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah, berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari ilmu Pemerintahan, dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya, serta dapat sebagai bahan masukan referensi dan bahan pembelajaran untuk mengatasi permasalahan yang timbul dimasyarakat khusunya dalam pengembangan objek wisata budaya di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.6.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah:

- Manfaat teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai bahan atau referensi didalam pembelajaran dan juga sebagai tambahan teori – teori yang berkaitan dengan kebijakan ataupun implementasi kebijakan.
- 2. Manfaat Praktis, Sebagai bahan masukan bagi pemerintah selaku aktor pelaksana dalam pengembangan wisata budaya pacu jalur dapat meningkatkan strategi untuk lebih mengembangkan dan mempromosikan wisata budaya pacu jalur ke tingkat Internasional.
- 3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refenresi dan bahan pembanding dalam melakukan penelitian yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Untuk mempedomani penelitian ini dan mendapatkan hasil penelitian dari permasalahan yang dikemukakan sebelumnya yaitu "Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur". Berikut disampaikan beberapa referensi mendukung variabel yang diteliti.

2.1.1. Konsep Pemerintahan

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, kehidupan sehari – hari erat hubungannya dengan fungsi – fungsi pemerintah di dalamnya. ¹

Pemerintahan adalah *Bestuurvoering* atau Implementasi tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ/ alat yang menjalankan pemerintahan.² Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang terjadi dari cabang – cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudisial atau alat – alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam

¹ Sarundajang. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

² Ridwan, HR.2002. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta

arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai Implementasi eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara. ³

Dalam Inu Kencana Syafiie⁴, berikut dijelaskan oleh beberapa ahli tentang pengertian dari "Pemerintahan" adalah sebagai berikut :

A.S Sayre menyatakan Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercing its authority. Maksudnya yaitu pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Wilson menyatakan "Government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few men, of many men, or of a community prepared by organization to realize its own purpose with references to the common affairs or the community. Pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud — maksud bersama mereka, dengan hal — hal yang memberikan keterangan bagi urusan — urusan umum kemasyarakatan.

Dari pengertian – pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah suatu cara pengorganisasian dengan menggunakan kekuasaan ataupun kewenangan untuk mengatur dan memberikan arahan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara agar tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

³ Bagir Manan. 2001. Menyonsong Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum. FH UII Yogyakarta.

⁴ Syafiie, Inu Kencana. 1994. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat⁵. Untuk membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut Rosseau adalah konflik kontrak sosial (social contract). Adanya kontrak sosial tersebut selanjutnya melahirkan kekuasan dan institusi pemerintahan⁶.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyasrakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada

⁶ Rousseau, Jean Jacques. 1986. The Social Contract. Penerjemah, Sumardjo. Jakarta. Erlangga.

⁵ Garna, Judistira K. 1996. Ilmu – Ilmu Sosial, Dasar Konsepsi Posisi. Bandung. Program Pascasarjana Unpad

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Osborne dan Gaebler (terjemahan Rosyid) ⁷ bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.⁸

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Osborne dan Gaebler bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus,

,

⁷ Rasyid, Ryass. 2000. Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah. LP3ES. Jakarta.

⁸ *Ibid*, Rasyid Hlm 192.

⁹ *Ibid*, Rasyid Hlm 192.

dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya. Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan hadir Karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.

Ndraha mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil¹⁰. Sejalan dengan itu, Kaufman menyebutkan bahwa: Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.¹¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid¹² yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

¹⁰ Ndraha, Taliziduhu, 2000. Ilmu Pemerintahan (Kybernology), Jakarta : Rineka Cipta.

¹¹ Thoha, Miftah. 1995. Kepemimpinan Dalam Manajemen. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

¹² *Ibid*, Hlm. 13

- 1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- 4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- 5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
- 6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
- 7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Lebih lanjut di bagian lain Rasyid¹³, menyatakan bahwa tugastugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh Ndraha¹⁴, fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua,

¹³ *Ibid*, Hlm. 59

¹⁴ *Ibid*, Hlm 85

pemerintah mempunyai fungsi sekunder fungsi pemberdayaan atau (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.1.2. Ilmu Pemerintahan

Landasan ontology merupakan wujud hakiki, hakekat dari objek yang diamati/ dikaji/ ditelaah oleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Berdasarkan pengertian ilmu pemerintahan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara objek forma dari llmu pemerintahan. Hal ini yang kemudian menjadikan kedudukan ilmu pemerintahan menjadi tidak jelas dan membingungkan. Hal ini disebabkan para ahli dalam memberikan defenisi tentang ilmu pemerintahan ini berdasarkan latar belakang ilmu – ilmu kenegaraan seperti ilmu politik, ilmu administrasi Negara, ilmu hukum dan lain – lain.

Ilmu pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli

tentang Ilmu Pemerintahan. Namun dari pengertian tersebut terdapat perbedaan pada objek forma Ilmu Pemerintahan, sedangkan objek materianya sama yaitu negara/pemerintah. Objek suatu ilmu pengetahuan menurut Inu Kencana¹⁵ adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Objek materia dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan ilmu lain, karena bersifat umum dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan (*subject matter*). Sedangkan objek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian (*focus of interest*) suatu disiplin ilmu pengetahuan.

Selanjutnya ia juga memberikan perbedaan dan persamaan ilmu-ilmu kenegaraan (yang terdiri dari Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Negara) ditinjau dari objek material dan objek formanya. Persamaan dari ilmu-ilmu kenegaraan tersebut terletak pada objek meterialnya, yaitu Negara. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek forma-nya. Objek forma dari Ilmu Politik adalah kekuasaan, kepentingan rakyat, grup penekan. Objek forma dari Ilmu Administrasi Negara adalah pelayanan, organisasi, manajemen, dan birokrasi. Objek forma dari Ilmu Hukum Tata Negara adalah peraturan perundang-undangan. Objek forma dari Ilmu Negara adalah konstitusi, timbul dan tenggelamnya negara. Dan objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah hubungan-hubungan pemerintahan, gejala, dan peristiwa pemerintahan.

Di tahun 1970, dalam perkembangannya dikenal tiga sosok Ilmu Pemerintahan, yaitu Ilmu Pemerintahan, Ilmu-Ilmu Pemerintahan, Ilmu

¹⁵ Kencana, 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama: Bandung. Hal 24.

Pemerintahan terapan. Yang dimaksud dengan Ilmu-ilmu Pemerintahan adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena pemerintahan, seperti manajemen pemerintahan, sosiologi pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan Ilmu Pemerintahan Terapan sama dengan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan. Ini berkaitan dengan fungsi pemerintah, yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan.

Pemerintahan dikenal juga dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.

MacIver dalam Franciscus¹⁶ merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal-mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsifungsi pemerintahan. Berdasarkan pendapat MacIver, objek forma dari Ilmu Pemerintahan sangat luas, tidak spesifik pada satu focus of interest.

Bayu Suryaningrat¹⁷ mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat. Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa Ilmu Pemerintahan ini mempelajari

Franciscus Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal 6
 Bayu Suryaningrat. 1980. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Aksara Baru: Jakarta. Hal 47

segala kebijaksanaan pemerintah, gerak dan tingkah-laku pemerintah dalam rangka usahanya mencapai tujuan pemerintah. Berdasarkan pen dapat ini, maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah organisasi dan kebijakan pemerintahan.

Musanef¹⁸ mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai suatu ilmu yang dapat menguasai, memimpin, serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Berdasarkan pendapat ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah kepemimpinan dalam pemerintahan.

Taliziduhu Ndaha¹⁹ mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah tujuan pemerintahan.

Syafiie²⁰ mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Berdasarkan pengertian ini maka

²⁰ Inu Kencana S. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama: Bandung. Hal 21.

¹⁸ Munasef. 1985. Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gunung Agung: Jakarta. Hal 47

¹⁹ Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta: Jakarta. Hal 7

objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah fungsi, hubungan hubungan pemerintahan.

Secara gamblang Ndraha²¹ mengemukakan ontologi Ilmu Pemerintahan menggunakan kontruksi pemikiran berdasarkan meta disiplin (basic flatform), sehingga common flatform dari berbagai disiplin ilmu itu ditemukan, yaitu hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (hubungan pemerintahan).

Van Ylst²² mengemukakan bahwa objek dari Ilmu Pemerintahan itu adalah pemerintahan dalam arti sempit, yaitu kekuasaan eksekutif dan bukan pemerintahan dalam arti luas yang mencakup kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, dengan diketahuinya objek dari Ilmu Pemerintahan maka salah satu ciri empiris dalam metodologi Ilmu Pemerintahan menjadi jelas. Kejelasan objek dibagi kedalam objek material dan objek forma dari Ilmu Pemerintahan.

- Objek material Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya, totalitas dari fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- b. Objek forma Ilmu Pemerintahan adalah realitas pemerintahan dalam arti sempit, yaitu fungsi kekuasaan eksekutif.

2.1.3. Pemerintah Daerah

Secara harfiah istilah pemerintahan atau dalam bahasa inggris adalah pedanan dari kata government. Jadi, Pemerintahan adalah lembaga atau badan-

 ²¹ Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta: Jakarta
 ²² Franciscus Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal.6.

badan publik yang mempunyai melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.²³ Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 ".²⁴

1. Asas Desentralisasi

Asas desenrtalisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.²⁵

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya. Jadi, asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemeritahan pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepaaa pejabat-pejabatnya di daerah.

3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembanuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam Implementasi urusan pemerintahan yang ditusaskan kepada pemerintahan

²³ Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013:8)

²⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁵ C.S.T. Kansil, Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008: 142).

daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Negara republik indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, pasal 18 undang-undang dasar 1945 antara lain antara lain menyatakan bahwa pembagian daaerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang.²⁶

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembatuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia.²⁷

Daerah indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang kecil. Didaerah-daerah yang bersifat otonom (streek en locale rechtgemeen schappen) atau yang bersifat belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan oleh undang-undang.

2.1.4. Konsep Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

²⁶ HAW. Widjaja, Otonomi......Op.Cir, h1

²⁷ Sitiawan Widagdo, Op Cit, h.143

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino²⁸ mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunj<mark>uk</mark>an apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab²⁹ memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- 1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 4.
- 5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit 6. maupun implisit

²⁸ Agustino, Leo. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.

- 7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- 8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- 9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- 10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno³⁰, istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada "kebijakan luar negeri Indonesia", "kebijakan ekonomi Jepang", dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design. ³¹

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi³² kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.

³⁰ Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI)

³¹ Suharno. 2009. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta. UNY Press.

³² Suandi, I Wayan. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.1, No. 1 Tahun 2010.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy³³ mengungkapkan bahwa kebijakan adalah "a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern" (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno³⁴ dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu k<mark>ons</mark>ep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno³⁵ juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau

 $^{^{33}}$ Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip perumusan kebijaksana
an Negara. Jakarta: Bumi Aksara 34 $Ibid\ 17$
 35 $Ibid\ 17$

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Edward III 36 berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

³⁶ AG, Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.5. Implementasi Kebijakan

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab³⁷, adalah memahami apa yang senyat<mark>anya terjadi sesud</mark>ah suatu program dinyat<mark>aka</mark>n berlaku atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan ol<mark>eh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan</mark> mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran Ali³⁸ telah ditetapkan. Implementasi menurut Lukman adalah yang mempraktekkan, memasangkan. Implementasi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun

³⁷Solichin Abdul Wahab, 2008, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 65

³⁸ Lukman Ali, dkk., 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1044

kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sedangkan menurut Riant Nugroho³⁹, implementasi pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang dinginkan. Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Adapun makna kebijakan, Budi Winarno⁴⁰ menyebutkan secara umum bahwa istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Namun demikian, pengertian kebijakan seperti ini hanya dapat digunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa dan menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang kebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis sebuah kebijakan publik.

Oleh karena itu, diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan⁴¹, mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya

³⁹ Riant Nugroho, 2003, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 158

 ⁴⁰Budi Winarno, 2008, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Medio Presindo, hal. 16
 ⁴¹ Hesel Nogi Tangkilisan, 2003, Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Lukman Offset, hal. 19

hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno⁴², mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Secara teoritis, teori tentang implementasi kebijakan cukup banyak, tetapi dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III sebagaimana dideskripsikan oleh Subarsono26berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

 Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Menurut pandangan Edward III sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno⁴³, proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

-

⁴² Budi Winarno, 2008, Op.cit.,hal. 146-147

⁴³ Budi Winarno, 2008, Loc.cit., hal. 175-177

- a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan;
- b. Faktor kedua adalah kejelasan. Jika kebijakankebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan; dan
- c. Faktor ketiga adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintahperintah pelaksaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintahperintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akanmemudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.
- 2) Sumberdaya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya manusia untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik sumber daya manusia yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Edwards, sebagimana dikutip oleh Budi Winarno28 sumbersumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno⁴⁴ terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi.

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasiorganisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite

⁴⁴ Ibid, hal. 181

legislatif, kelompokkelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2.1.6. Konsep Manajemen Pariwisata

Istilah manajemen sering diidentikkan dengan istilah pengelolaan. Tidak sedikit orang yang mengartikan pengelolaan sama dengan arti manajemen. Antara manajemen dan pengelolaan memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk bekerja dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan.

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan⁴⁵ managemen is a distinct prosess consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determind and accomplish stated objectivies by the use of human being and other resources. Maksudnya manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi pengelolaan dan manajemen adalah sama yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Definisi pariwisata dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan juga tidak memiliki batasan-batasan yang pasti. Para ahli pariwisata banyak yang

⁴⁵ Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi. Aksara.

berpendapat definisi pariwisata dari berbagai sudut pandang, tetapi dari berbagai definisi tersebut mempunyai makna yang sama. Menurut Hunziker dan Kraft dalam Muljadi⁴⁶ mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing atau keseluruhan hubungan perjalanan itu tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah. Sehingga dalam melakukan perjalanannya tersebut hanya mencari hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Jadi, pariwisata itu adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang dierlukan, yaitu harus bersifat sementara, harus bersifat sukarela dalam arti tidak terjadi karena terpaksa dan tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah atau bayaran.

Didalam kamus besar indonesia, Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang/sekelompok orang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan tujuan mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiataan reakreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Pariwisata adalah

⁴⁶ A.J, Mulyadi. 2012. Kepariwisataan dan Perjalanan, Jakarta: Raja Grafindo. Persada.

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan menurut Pitana dalam (Hanum, 2014:49) menyatakan bahwa definisi pariwisata yang dikemukan mengandung beberapa unsur pokok, yaitu:

- Adanya perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ketempat lain.
- 2. Adanya unsur tinggal sementara di tempat yang bukan tempat tinggal nya.
- 3. Tujuan utama atau pergerakan manusia tersebuit bukan untuk mencari atau penghidupan pekerjaan ditempat yang akan dituju.

Dari penjelasan diatas tentang pariwisata dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang didukung dengan segala fasilitas sekaligus kegiatan wisata yang menguntungkan berbagai pihak baik wisatawan atau pengunjung, masyarakat dan pemerintah setempat. Namun dari beberapa definisi tersebut terlihat bahwa pariwisata akan memberikan keuntungan apabila dikelolah secara maksimal baik oleh masyarakat setempat, pemerintah, pihak swasta dan juga wisatawan.

Menurut Pandit dalam Astarina (2010:11), pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wisata Budaya Adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Seiring perjalanan serupa

ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik, dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.

- 2. Wisata Maritim atau Bahari Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air, lebih-lebih di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan didaerah-daerah atau negara-negara maritim, di Laut Karibia, Hawaii, Tahiti, Fiji dan sebagainya.
- 3. Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi) Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha—usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang—undang.
- 4. Wisata Konvensi Yang dekat dengan wisata jenis politik adalah apa yang dinamakan wisata konvensi. Berbagai negara pada dewasa ini membangun wisata konvensi ini dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan— ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konfrensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- 5. Wisata Pertanian (Agrowisata) Sebagai halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek—proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat—lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur—mayur dan palawija di sekitar perkebunan yang dikunjungi.
- 6. Wisata Buru Jenis ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan, seperti berbagai negeri di Afrika untuk berburu gajah, singa, ziraf, dan sebagainya.
- 7. Wisata Ziarah Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat— tempat suci, ke makam—makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap monyetmat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Berkaitan dengan objek wisata Taman Hutan Monyet, maka Taman Hutan Monyet masuk jenis wisata cagar alam. Taman Hutan Monyet dapat masuk kategori wisata cagar alam karena hutan ini dilindungi kelestarian lingkungannya oleh peraturan daerah setempat.

Manajemen pariwisata tidak terlepas dari dua konsep yaitu: konsep manajemen dan konsep pariwisata. Kedua konsep tersebut sangat berhubungan, karena dalam manajemen pariwisata selain memerlukan sarana dan prinsip-prinsip manajemen, pada manajemen pariwisata memerlukan aspek potensi yang dimiliki oleh objek wisata tersebut sebagai input awal penawaran wisata agar dapat dilakukan proses manajemen. Menurut Medlik dalam Astarina (2010:19) ada empat aspek (4A) yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspekaspek tersebut adalah:

- a. Attraction (daya tarik) Dimana daerah tujuan wisata dalam menarik wisatawan hendaknya memiliki daya tarik baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya .
- b. Accesable (bisa dicapai). Dalam hal ini dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata
- c. Fasilitas (Amenities) Syarat yang ketiga ini memang menjadi salah satu syarat Daerah Tujuan Wisata (DTW) dimana wisatawan dapat dengan monyetsan tinggal lebih lama di daerah tersebut.

d. Adanya Lembaga Pariwisata (Ancillary) Wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW (Daerah Tujuan Wisata) apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan (*Protection of Tourism*) dan terlindungi baik melaporkan maupun mengajukan suatu kritik dan saran mengenai keberadaan mereka selaku pengunjung / Orang berpergian.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan aspek penawaran sangat dibutuhkan dalam manajemen pariwisata. Aspek tersebut erat kaitannya dengan manajemen objek wisata, objek wisata yang akan dikelola harus memiliki potensi yang dapat dilihat dari terpenuhinya aspek-aspek tersebut.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pariwisata adalah suatu tindakan — tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfataan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam bidang pariwisata.

2.1.7. Konsep Promosi

Promosi merupakan bagian dari pemasaran. Promosi termasuk salah satu aspek dalam bauran pemasaran (*marketing mix*). Promosi kepariwisataan merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi penyelenggara pariwisata untuk memengaruhi pengambilan keputusan dalam membeli suatu produk atau jasa pariwisata yang ditawarkan oleh suatu daya tarik wisata.⁴⁷

⁴⁷ Bambang Sunaryo. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Promosi adalah sarana untuk menjual yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui volume penjualan⁴⁸. Promosi juga merupakan variabel kunci rencana strategi pemasaran. Dengan kata lain, promosi dinyatakan sebagai variabel kunci karena mendisitribusikan informasi atas produk yang ditawarkan ke konsumen.

Promosi pariwisata berperan sebagai penghubung yang digunakan untuk mempercepat proses keputusan pembelian oleh wisatawan. Kegiatan promosi bertujuan agar produk yang ditawarkan lebih cepat dikenal oleh pelanggan potensial. Promosi merupakan sebuah sarana dalam upaya peningkatan penjualan dengan menginformasikan barang atau jasa yang ditawarkan pihak perusahaan kepada konsumen potensial.⁴⁹

Menurut Hasan⁵⁰ inti kegiatan promosi adalah bentuk kegiatan komunikasi pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, memengaruhi, mengingatkan pasar agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

Promosi pariwisata merupakan komunikasi pemasaran untuk memberikan informasi atas layanan pariwisata yang disediakan oleh perusahaan pariwisata. Promosi pariwisata bertujuan agar layanan pariwisata lebih dikenal oleh wisatawan, sehingga dapat memengaruhi dalam pembelian layanan pariwisata. Promosi merupakan bagian komunikasi dalam pemasaran yang menyediakan

⁴⁸ Pitana, I Gde. dan Surya Diarta, I Ketut. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta : Penerbit Andi.

⁴⁹ Astuti, Marhanani, Tri. 2015. 'Potensi Wisata Olah Raga Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan'. Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan, Kementerian Pariwisata RI Jakarta.

⁵⁰ Ali Hasan, 2013, Marketing, Cetakan Pertama, Media Pressdindo Yogyakarta.

informasi dan pengetahuan dengan cara yang informatif dan persuasif bagi wisatawan⁵¹.

Promosi pariwisata merupakan fungsi pemasaran yang fokus dalam mengkomunikasikan produk layanan jasa wisata. Komunikasi dilakukan secara persuasif yang ditujukan kepada calon wisatawan untuk memberikan infromasi mengenai layanan jasa wisata. Tujuan promosi pariwisata adalah untuk mendorong terciptanya keputusan pembelian oleh wisatawan.

Promosi tempat wisata daerah merupakan kegiatan dari para pelaku ekonomi di lokalitas perekonomian tertentu yang memiliki potensi tempat wisata yang menarik. Potensi tersebut dapat berupa keindahan alam yang menonjol, kekayaan budaya yang unik, situs tempat yang bersejarah, even pesta budaya dan keagamaan, serta potensi pusat-pusat kegiatan ekonomi, perdagangan dan investasi yang unik tidak dimiliki oleh lokalitas alternatif lainnya.

Tujuan promosi wisata daerah dapat dikategorikan ke dalam beberapa tujuan berikut ini:

- Mempromosikan lokalitas wisata sebagai tujuan wisata yang menarik dan menguntungkan wisatawan
- Meningkatkan dan memantapkan citra wisata daerah di pasar domestik dan internasional
- 3. Menyebarkan pengetahuan tentang produk-produk wisata yang telah dikembangkan
- 4. Membangun dan membina komunikasi yang efektif dengan media dan pers internasional.

⁵¹ Ibid, Astuti.

Tujuan promosi wisata daerah tersebut hendaknya dipilih beberapa saja agar dapat terselenggarakan dengan baik, mengingat keterbatasan anggaran daerah yang dimiliki.

Menurut Setiyaningrum⁵², terdapat tiga tujuan promosi, yaitu:

- 1. Menginformasikan (*informing*) Adalah memberitahukan informasi selengkap-lengkapnya kepada calon pembeli tentang barang yang ditawarkan, siapa penjualnya, siapa pembuatnya, dimana memperolehnya, harganya dan sebagainya. Informasi yang digunakan dapat diberikan melalui tulisan, gambar, kata-kata dan sebagainya, yang disesuaikan dengan keadaan.
- 2. Membujuk (*persuading*) Adalah membujuk calon konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Perlu ditekankan di sini bahwasannya membujuk bukan berarti memaksa calon konsumen sehingga keputusan yang diambil mungkin justru keputusan yang negatif.
- Mengingatkan (reminding) Adalah mengingatkan konsumen tentang adanya barang tertentu, yang dibuat dan dijual perusahaan tertentu, ditempat tertentu dengan harga yang tertentu pula. Konsumen kadang
 kadang memang perlu diingatkan, karena mereka tidak ingin bersusah payah untuk selalu mencari barang apa yang dibutuhkan dan dimana mendapatkannya.

Menurut Setiyaningrum⁵³ bauran promosi adalah kombinasi empat komponen promosi yang mencakup iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan,

 $^{^{52}}$ Ari Setyaningrum, J. U. (2015). Prinsip-Prinsip Pemasaran. Yogyakarta: Andi.

hubungan masyarakat, dan publikasi. Sebuah promosi yang efektif membutuhkan diferensiasi produk, segmentasi pasr, melakukan jual beli, dan memberi merek. Oleh karena itu, pembuatan bauran promosi yang efektif menyangkut pengambilan putusan – putusan strategis. Bauran promosi terdiri atas beberapa komponen utama yaitu:

- 1. Iklan: bentuk presentasi bukan personal (nonpersonal) dan promosi atas gagasan, barang, atau jasa oleh seseorang atau sponsor yang teridentifikasi dalam media, seperti majalah, koran, poster, pengiriman surat secara langsung (direct mail), radio, televisi, katalog, dan sirkuler.
- 2. Penjualan pribadi (*personal selling*) : sebuah presentasi oral dalam pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli prospektif, tujuannya melakukan penjualan.
- 3. Promosi penjualan (*sales promotion*): kegiatan –kegiatan pemasaran, selain penjualan pribadi, iklan dan publikasi yang menstimulasi pembelian konsumen serta efektivitas penyalur, seperti display, pertunjukan dan pameran, demonstrasi, kupon, kontes, dan usaha-usaha penjualan tidak rutin lainnya. Hal ini biasanya merupakan kegiatan jangka pendek.
- 4. Hubungan masyarakat (*public relations*): menyangkut sejumlah usaha berkomunikasi untuk mendukung sikap dan opini publik terhadap organisasi serta produknya. Bentuk promosi tidak secara spesifik menyampaikan berita mengenai penjualan produk perusahaan.usaha

⁵³ Ibid, Setyaningrum.

pemasar dalam hal ini lebih seolah- olah menyampaikan berita dari pada melaksanakan komunikasi penjualan langsung kepada pelanggan. Public relations atau biasa disebut PR dapat dilakikan dengan menyampaikan secara berlebihan informasi mengenai perusahaan atau produk. Jika dilaksanakan dengan tepat, bentuk ini dapat mendukung secara efektif penjualab produk.

5. Publikasi: menciptakan sikap dan opini yang baik terhadap perusahaan serta produknya, dengan mengembangkan berita komersial yang signifikan dalam media massa mengenai perusahaan dan produknya atau dengan memperoleh presentasi yang menguntungkan di radio, televisi, atau sebuah pertunjukan. Tidak seperti iklan, biaya media promosi ini tidak dibanyar oleh sponsor.

2.1.8. Konsep Pacu Jalur

Kata "jalur" dalam dialek Melayu Rantau Kuantan sulit dicarikan padanannya secara tepat maknanya dalam Bahasa Indonesia. Meskipun demikian, penjelasan dalam berbagai Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Dewan dapat membantu memahami kata tersebut, seperti dijelaskan oleh W.J.S Poewadarminta, jalur adalah barang tipis panjang⁵⁴; sedangkan Sulchan Yasyin menjelaskan jalur adalah sampan kecil yang dibuat dari sebatang pohon, perahu belongkang⁵⁵; dalam Kamus Dewan dijelaskan jalur adalah perahu dibuat dari sebatang kayu yang dikorek. ⁵⁶

⁵⁴ W.J.S. Poewadarminta.1966. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka

Sulchan Yasyin. (1997). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amanah.
 Kamus Dewan (2005). Edisi Keempat. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Penjelasan beberapa kamus diatas sedikit banyaknya dapat menjelaskan dan menggambarkan jalur seperti yang dipahami oleh masyarakat Melayu Kuantan. Dalam dialek masyarakat Kuantan Singingi, Jalur adalah sebuah perahu yang pada awal abad ke-17 digunakan sebagai alat transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan yang berada di sepanjang Sungai Batang Kuantan.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Kuantan Jalur merupakan wujud kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun. Bagi masyarakat Rantau Kuantan jalur memiliki makna tersendiri, baik bagi diri pribadi maupun sebagai warga kampung. Jadi, tidak sempurna suatu kampung jika warganya tidak mempunyai jalur. Jalur merupakan hasil karya budaya yang memiliki nilai estetik tersendiri, dan juga mencakup kreativitas dan imaginasi. Hal ini terlihat dengan jelas dari beberapa seni budaya yang terdapat di jalur, seperti seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jalur merupakan upaya masyarakat Rantau Kuantan masa lalu untuk memenuhi kebutuhan manusia akan rasa indah, dan sekaligus sebagai penikmat keindahan tersebut.

Sedangkan Kata pacu jalur terdiri dari dua kata, yaitu pacu dan jalur. Pacu adalah perlombaan memacu atau mendayung. Dengan demikian, pacu jalur adalah perlombaan dayung menggunakan jalur tradisional yang menjadi ciri khas daerah Kuantan Singingi (Kuansing) yang sampai sekarang masih bertahan. Lomba dayung (Pacu Jalur) diselenggarakan setiap satu tahun sekali untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga menggunakan upacara adat khas daerah Kuansing.

Perlombaan ini adalah sebuah perlombaan tim dayung yang hanya dilakukan oleh kaum laki-laki yang berusia antara 15 sampai 50 Tahun. Sebuah tim akan berlomba dengan tim lainnya dalam mendayung jalur masing-masing.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil dari penelitian sebelumnya yang dapat menjadi acuan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, yang memiliki relevansi dan keterkaitan topik. Pada penelitian ini mengacu pada penelitian Tesis yang berjudul Strategi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Pariwisata Lumbok Ranau Untuk Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat oleh G. Liansie (2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengembangan Pariwisata Lumbok Ranau untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Barat. Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan citra seni dan budaya daerah dan pariwisata, sekaligus melestarikannya demi kelangsungan generasi berikutnya.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian adalah dengan cara mewawancarai informan di Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mendapatkan data subjek penelitian yang benar-benar sesuaidengan karakteristik subjek penelitian. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis.

Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini bahwa strategi dalam upaya pengembangan pariwisata di Lumbok Ranau Kabupaten Lampung Barat adalah: (1) Meningkatkan Sumber Daya Profesional di bidang kepariwisataan (2) Meningkatkan Jasa Usaha Kepariwisataan di Kawasan wisata Lumbok Ranau (3) Meningkatkan Intensitas Promosi Kepariwisataan. Rekomendasi peneliti adalah sebaiknya SDM profesional perlu ditingkatkan serta intensitas promosi perlu dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat sekitar.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi orisinalitas dari masing – masing penelitian. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian yaitu pengembangan pariwisata dan juga pada metode penelitian dengan menggunakan teknik kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel penelitian, pada penelitian terdahulu variabelnnya adalah manajemen strategis dengan menggunakan analisis SWOT sedangkan penelitian yang akan dilakukan variabelnya adalah kebijakan publik. Dan perbedaan terdapat pula pada locus dan waktu penelitian sehingga penelitian ini sangat perlu dilakukan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada prinsipnya penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya namun melakukan pengembangan sekaligus melanjutkan penelitian sebelumnya melalui implementasi kebijakan mengenai pengembangan budaya pacu jalur. Untuk lebih memahami, berikut diklasifikasikan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dengan menggunakan tabel.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

Penelitian	Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil
1	2	3	4	5	6
Penelitian terdahulu	G. Lianse	Strategi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengemban gan Pariwisata Lumbok Ranau untuk Memaksima lkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat	Kualitat	1. Strength 2. Weakness 3. Opportunities 4. Threats	Hasil penelitian adalah strategi dalam upaya pengembangan pariwisata di Lumbok Ranau Kabupaten Lampung Barat adalah: Meningkatkan Sumber Daya Profesional di bidang kepariwisataan Meningkatkan Jasa Usaha Kepariwisataan di Kawasan wisata Lumbok Ranau Meningkatkan Intensitas Promosi Kepariwisataan
Penelitian Sekarang	Faizal Amri	Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromo sikan Budaya Pacu Jalur	Kualitat	 Komunikasi Sumberdaya Disposisi Struktur Birokrasi 	Berkembangnya budaya pacu jalur di Kancah Internasional

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan semua teori diatas, kemudian peneliti membuat kerangka pemikiran untuk dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran seperti gambar 2.1. berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur.

2.4. Konsep Operasional

Penelitian Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur menganut konsep operasional sebagai berikut :

 Pemerintahan adalah suatu cara pengorganisasian dengan menggunakan kekuasaan ataupun kewenangan untuk mengatur dan

- memberikan arahan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara agar tujuan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- 2. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
- 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembatuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.
- 4. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- 5. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
- 6. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

- kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 7. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 8. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 9. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.5. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan langkah lebih lanjut dari defenisi konseptual yang berbentuk indikator – indikator variabel yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Adapun operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2. Operasionalisasi Variabel Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Variabel			
Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan	Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi	 a. Koordinasi dengan instansi terkait b. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar Negeri. c. Pembuatan papan informasi pariwisata Kab/Provinsi
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran- sasaran yang telah ditetapkan. (Wahab, 2008:65)	PEK	2. Sumber daya	 a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata b. Pelatihan pemandu wisata terpadu c. Peningkatan SDM Pariwisata d. Evaluasi pelaksanaan program pengembangan promosi wisata
		Disposisi Struktur organisasi	 a. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata Penunjang event pacu jalur b. Pameran gebyar nusantara a. Kejalasan tupoksi b. Kejelasan standar operasional prosedur

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur ini, peneliti menggunakan metode kualitat analisis deskriptif. Peneliti akan membuat sebuah narasi terhadap semua data yang muncul dari hasil yang ditemukan peneliti pada masanya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif dengan cara menyajikan data secara faktual dan akurat mengenai fakta – fakta riil yang ada dilapangan.

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi maka peneliti

memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah 1 orang Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan — informan berikutnya, dengan catatan informan — informan tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan pertama.

Adapun informan pendukung dari penelitian ini terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, 1 orang Kepala Bidang Pemasaran Ekonomi Kreatif, dan 1 orang Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata serta 6 orang masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan event pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari keseluruhan jumlah *Key Informan* dan informan pendukung berjumlah 10 orang.

Tabel III.1: Jumlah Informan Penelitian

No	Inf <mark>or</mark> man Penelitian	Jumlah	Keterangan
1	Kepala <mark>Dina</mark> s Pariwisata dan	1	Key Informan
	Kebudayaan Kab. Kuansing		
2	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	1	Key Informan
3	Kepala Bidang Pemasaran Ekonomi	1	Key Informan
	Kreatif		
4	Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata	1	Informan
5	Tokoh Masyarakat	6	Informan
	Jumlah	10	

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

3.4. Teknik Penarikan Informan

Penulis menetapkan untuk menggunakan dua teknik dalam penarikan sampel yaitu teknik sensus dan teknik *purposive sampling*, menurut Supriyanto

dan Machfudz¹ Teknik sampling (sensus) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik ini ditujukan Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bidang dan Kepala Seksi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan untuk tokoh masyarakat menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik purposive sampling menurut Sugiyono² adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini penulis memilih tokoh masyarakat yang berpartisipasi pada pelaksaan Event Pacu Jalur dan Mempromosikan Budaya Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Peneliti akan menggunakan data primer sebagai data utama di dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dikemukakan. Dimana data ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai jawaban masalah dan ditemukan langsung oleh peneliti sewaktu melakukan penelitian dilapangan.

2. Data sekunder

Peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung yang didapat oleh peneliti dari pihak lain serta dokumen – dokumen pelaksanaan kebijakan dalam mempromosikan budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

¹ Supriyanto, Achmad Sani dan Masyhuri Machfudz. 2010. Metodologi Riset: Manajemen Sumber Daya Manusia. Malang: UIN- Maliki Press.

² Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung; Alfabeta.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah menggunakan teknik dan jenis instrument sebagai berikut :

1. Pengamatan Langsung (observasi)

Menurut Darmawan, Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan lembaran pengamatan berbentuk format yang mudah diisi dan mudah pula dianalisis. ³

Menurut Riduwan observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. ⁴

2. Dokumentasi

Menurut Riduwan dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku – buku yang relevan, peraturan – peraturan, laporan kegiatan, foto – foto, film documenter, data yang relevan dengan penelitian. Adapun yang menjadi instrumennya adalah daftar cocok dan tabel. ⁵

3. Wawancara mendalam

Menurut Riduwan wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. ⁶Wawancara

³ Darmawan, Deni. Metode Penelitian Kuantitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2013:163

⁴ Riduwan. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta. Bandung. 2013:104

⁵ *Ibid* Hlm 105

⁶ *Ibid* Hlm 102

yang akan digunakan adalah wawancara berstruktur bahwa pewawancara sudah mempersiapkan pertanyaan – pertanyaan tertulis yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun jenis istrumen yang penulis akan gunakan yaitu pedoman wawancara (interview guide).

4. Telaah pustaka

Telaah pustaka dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan konsep dan teori yang berkaitan secara langsung. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian tersebut terarah dan tujuan penelitian ini dapat tercapai.

3.7. Teknik Analisis Data

Peneliti akan mengelompokkan hasil pengumpulan data dan melakukan analisis deksriptif terhadap data tersebut dalam bentuk kalimat yang merupakan jawaban hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada masanya. Dimana analisis akan dihubungkan dengan teori dan variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian melakukan penarikan kesimpulan terhadap data hasil penelitian tersebut, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Induktif.

3.8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian tentang Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur dimulai pada Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 seperti rincian penggunaan waktu perkegiatan yang tertera pada tabel berikut :

Tabel III.2: Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu

	Dudaya 1 acu																							
		Bulan dan Minggu Ke																						
No	Jenis Kegiatan	Februari M		Ma	Maret		April		Mei			Juni			Juli									
		1	2	3 4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Persiapan dan										A													
1	Penyusunan		٦							H	ς	٧												
1	Usulan								١.	`	J	М		`										
	Penelitian													1										
	Seminar														U	h	7							
2	Usulan		100	ER:	311	AS	13	SL,	4/1	16	,	٠,				А	/							
	Penelitian Penelitian	11	11/4								49	0												
3	Riset																							
4	Penelitian		١,								4													
_ +	Lapangan																							
	Pengolahan											Š												
5	dan Analisis			I.			V.																	
	Data																							
	Konsultasi					1	13								А									
6	Bimbingan											Щ			А									
	Tesis						V							1										
7	Ujian Te <mark>sis</mark>											P		7										



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Daerah Penelitian

Kabupaten Kuantan singing atau rantau kuantan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun secara resmi Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tanggal 3 Oktober 1999 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Batam. Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya di Teluk Kuantan.

Tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2021"

Adapun makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di atas adalah sebagai berikut:

- 1. **Unggul** adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.
- 2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib, dan harmonis.
- 3. **Agamis** adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

MISI

 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;

- 2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
- Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;
- 4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
- 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
- 6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

Defenisi misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih diarahkan pada pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, partisipatif dan berkepastian hukum, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta dan pihak lainnya sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif adalah peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pembangunan yang peka terhadap kebutuhan daerah dan memiliki kapabilitas serta kualitas dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan

- pembangunan yang bertanggung jawab sehingga tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai.
- 3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata adalah memprioritaskan pembangunan berdasarkan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dengan mensinkronkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasiskan kepada sektor pertanian dan pariwisata.
- 4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek fungsi lahan dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
- 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata adalah meningkatkan pemerataan pembangunan di masyarakat yang didukung dengan peningkatan dan optimalisasi infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.
- 6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya adalah mewujudkan suasana kehidupan beragama yang rukun, melaksanakan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

4.1.1. Keadaan Geografis

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km² (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar 25-30° dari permukaan laut yang berbatasan lansung dengan:

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- 4. Sebelah Sekatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Berikut rincian luas wilayah kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

	Singing.		
NO	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM²)
1	2	3	4
1	Kuantan Mudik	Lubuk Jambi	564,28
2	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	384,40
3	Gunung Toar	Kampung Baru	165,25
4	Pucuk Rantau	Pangkalan	821,64
5	Singingi	Muara Lembu	1.953,66
6	Singingi Hilir	Koto Baru	1.530,97
7	Kuantan Tengah	Teluk Kuantan	270,74
8	Sentajo Raya	Koto Sentajo	145,70
9	Benai	Benai	124,66
10	Kuantan Hilir	Baserah	148,77
11	Pangean	Pangean	145,32

1	2	3	4
12	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	380,34
13	Kuantan Hilir Seberang	Koto Rajo	114,29
14	Cerenti	Cerenti	456,00
15	Inuman	Inuman	450,01
	Jumlah total		7.656,03

Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 7.656.03 km². Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari 15 kecamatan,11 kelurahan dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 km² sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayah 114.29 km².

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C – 36,°C dan suhu maksimumberkisar antara 19,2°C – 22,°C. Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49 – 433,19 mm pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan Maret s/d Agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan holtikultura adalah curah hujan. Menurut klasifikasi Koppen, tiap iklim di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau hujan tahunan 1.500 mm dimana dengan iklim ini menjadikan kabupaten Kuantan Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan.

4.1.2. Topografi Kabupaten Kuantan Singingi

Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian alevasi bervariasi, dimana alevasi tertinggi mencapai 804 meter diatas permukaan laut danengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah pergunungan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah orgonosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur.

4.1.3. Demografi Kabupaten Kuantan Singingi

1. Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengambangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2019 sebanyak 333.140 jiwa.Bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi

	Singingi	T	
No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju
			Pertumbuhan
1	Kuantan Mudik	25,01	-0,12
2	Hulu Kuantan	9,07	0,31
3	Gunung Toar	14,20	0,51
4	Pucuk Rantau	10,05	1,06
5	Singingi	33,17	1,50
6	Singingi Hilir	42,05	1,87
7	Kuantan Tengah	50,30	0,23
8	Sentajo Raya	30,73	0,99
9	Benai	17,55	-1,59
10	Kuant <mark>an H</mark> ilir	14,06	0,65
11	Pangean	19,78	1,57
12	Logas Tanah Darat	23,24	1,11
13	Kuanta <mark>n H</mark> ilir <mark>Sebera</mark> ng	11,29	-0,08
14	Cerenti	15,97	0,57
15	Inuman	16,67	-0,74
	Jumlah	333,14	0,66

Sumber: Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum konsentrasi penduduk relatif tinggi pada daerah yang berada pada perlintasan jalan nasional. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang peling tinggi terletak pada Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 50.300 jiwa dan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya yang terkecil adalah Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk berkisar 9.070 jiwa.

2. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan untu padi seluas 10.237 Ha pada tahun 2018, dengan hasil produksi 41.312,16 Ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, timun, terong, kol dan tomat. Begitu juga dengan komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.422 ekor. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan antara lain produksi hutan terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan Lindung 28.000 Ha dan hutan margasatwa 136.000 Ha. Selain itu Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga. Terakhir ada juga beberapa bidang potensial unutk investasi diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

4.1.4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sebelumnya disebut dengan Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata. Penyelenggaraan pemerintahan untuk bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami 5 kali perpindahan kantor, hal ini dikarenakan pada saat itu belum adanya komplek perkantoran khusus pemerintah daerah Kabupaten

Kuantan Singingi. Adapun alamat yang pernah ditempati Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata adalah:

- 1. Di Desa Sawah Taluk Kuantan pada tahun 2002-2003
- 2. Di Desa Koto Taluk Kuantan pada tahun 2003-2004
- 3. Di Kelurahan Simpang Tiga Taluk Kuantan pada tahun 2004-2005
- 4. Di Kantor Wisma Jalur pada tahun 2005-2007.

Pada saat itu, Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata masih berada di wilayah administrasi pemerintah Daerah Tingkat II Indragiri Hulu. Sejalan dengan perkembangan daerah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000, disahkan pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 1999 beserta pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, dan Kota Batam.

1. Visi dan Mi<mark>si Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</mark> Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun Rumusan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah: "Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai Negeri yang Berbudaya, Tujuan Wisata, yang handal berprestasi dan berekonomi kriatif yang inopatif". Adapun Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- Melestarikan dan menyemarakan Pesta Budaya Kebanggan kita Pacu
 Jalur dan Kesenian asli Kuantan Singingi sehingga dapat mendorong
 kemajuan Perekonomian/Kesejahteraan masyarakat kita (tempatan).
- Meningkatkan SDM di bidang Kepariwisataan yang dapat mengelola potensi budaya, kesenian dan Alam yang ada menjadi objek dan tujuan wisata Domestik maupun Manca negara.
- 3. Menggali, membangun, mengembangkan dan melestarikan potensi kepariwisataan Kuantan Singingi secara terencana dan berkesinambungan.
- 4. Mempromosikan secara luas tentang Kepariwisataan Kabupaten Kuantan Singingi di tingkat lokal, nasional, regional dan Internasional.
- Menyusun dan memberlakukan Regulasi tentang Pengusahaan Bidang Kepariwisataan dalam rangka Pengawasan dan ketertiban serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
- Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

Sehubungan telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

A. Kepala Dinas

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan

dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perencanaan dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan,
- 2. Pengkoordinasian dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan,
- 3. Pelaksanaan fasilitas dibidang pariwisata dan dibidang kebudayaan,
- 4. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan,
- 5. Pelaksanaan kegiatan dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan,
- 6. Pembinaan dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan
- 7. Pengawasan dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan,
- 8. Pengendalian dan monitoring dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan,
- 9. Pengevaluasian dan pelaporan dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan, dan,
- 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1. Pengelolaan data,
- Penyusunan program dan anggaran bidang program, umum dan keuangan,
- 3. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran dinas pariwisata dan kebudayaan,
- 4. Penyelenggaraan ketatausahaan,
- 5. Pembinaan kepegawaian,
- 6. Pengelolaan sarana dan prasarana,
- 7. Penyelenggarakan urusan rumah tangga,
- 8. penyelenggaraan perjalanan dinas
- 9. Penyelenggaraan fungsi kehumasan,
- 10. Penyelenggaraan keprotokolan,
- 11. Pen<mark>gelo</mark>laan keuangan,
- 12. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan,
- 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan dan keprotokolan. Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan;
- 2. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian;
- 3. Penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana;
- 4. Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga,
- 5. Penyiapan bahan perjalanan dinas;
- 6. Penyiapan bahan penyelenggaraan kehumasan;
- 7. Penyiapan bahan penyelenggaraan keprotokolan, dan
- 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub Bagian Program

Sub bagian progaram mempunyai tugas melaksanakan persiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Sub bagian program dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyiapan bahan pengumpulan dan inventariasi data;
- 2. Penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisa data;
- 3. Penyiapan bahan penyajian data;
- 4. Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran;
- 5. Penyiapan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian program;

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Destinasi Pariwisata

Kepala bidang destinasi pariwisata mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Bidang destinasi pariwisata. Kepala bidang destinasi pariwisata dalam melaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi pariwisata
- 2. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang destinasi pariwisata,
- 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang destinasi pariwisata,
- 4. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata,
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata Kepala bidang pemasaran dan ekonomi kreatif pariwisata mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran dan ekonomi kreatif pariwisata. Kepala bidang pemasaran dan ekonomi kreatif pariwisata dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan ekonomi kreatif pariwisata,
- 2. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pemasaran dan ekonomi kreatif pariwisata,
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemasaran dan ekonomi kreatif pariwisata,
- 4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran dan ekonomi kreatif pariwisata,
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

G. Bidang Kebudayaan

Kepala bidang kebudayaan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bidang kebudayaan. Kepala bidang dalam melaksanakan tugas meyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan,
- 2. Penyusunan rencana program dan anggaran bidang kebudayaan,
- 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan,
- 4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan,
- Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh kepala dinas sesuai dengaan tugas dan fungsinya.

H. Bidang Kesenian Tradisional,

Sejarah dan Cagar Budaya Kepala bidang kesenian tradisional, sejarah dan cagar budaya mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesenian tradisional, sejarah dan cagar budaya. Kepala bidang kesenian tradisional, sejarah dan cagar budaya dalam melaksanakan tugas meyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesenian tradisional, sejarah dan cagar budaya,
- Penyusunan rencana program dan anggaran bidang kesenian tradisional, sejarah dan cagar budaya
- 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesenian tradisional, sejarah dan cagar budaya
- 4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian tradisional, sejarah dan cagar budaya
- Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh kepala dinas sesuai dengaan tugas dan fungsinya.

4.2. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari informan berupa data mengenai jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

4.2.1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran Ekonomi Kreatif, Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tokoh Masyarakat terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki – laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional informan yang bersangkutan dalam menanggapi Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan yang ada pada penelitian ini, bisa dilihat pada tabel V.1 berikut:

Tabel IV.1: Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin

No	J <mark>enis</mark> Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – Laki	8	80%
2	Perempuan	2	20%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah informan pada penelitian ini jika dilihat dari jenis kelamin laki – laki adalah 8 orang dengan persentase 80%, dan untuk jenis kelamin perempuan adalah 2 orang atau sama dengan jumlah persentase 20%, dari keseluruhan responden yang diwawancara berjumlah 10 orang.

4.2.2. Umur Informan

Umur seseorang dapat mencerminkan kemampuan dan kondisi seseorang secara fisik, yang memungkinkan menjadi pertimbangan dalam pasar tenaga kerja. Tabel berikut ini menjelaskan jumlah informan yang diklasifikasikan berdasarkan umur.

Tabel IV.2: Jumlah Informan Menurut Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 30	1	10%
2	30 - 40	4	40%
3	41 – 50	3	30%
4	>50	2	20%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata – rata usia informan berkisar antara 30 sampai dengan 40 tahun, hal ini dilihat dari jumlah informan yang berumur 30 – 40 tahun berjumlah 4 orang dari 10 orang informan atau sebesar 40%. Sedangkan yang berumur diantara 41-50 tahun berjumlah 3 orang atau dengan persentase 30%, kemudian yang berumur lebih dari 50 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 20% sedangkan informan yang berumur dibawah 30 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 10%.

4.2.3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola fikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola fikir serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan

tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan – tahapan baik dari keluarga (non-formal), lingkungan (non-formal), maupun sekolah (formal).

Adapun tingkat pendidikan informan pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3: Jumlah Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	6	60 %
2	Strata 1	4	40 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber: Data olahan penulis 2020

Dari data diatas diketahui bahwa untuk identitas informan dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk pendidikan SLTA adalah 6 orang dengan persentase 60%, sedangkan untuk pendidikan Strata 1 adalah 4 orang dengan persentase 40%.

4.3. Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan suatu daerah yang kaya akan budaya dan tradisi seperti Air Terjun Guruh Gemurai, Air Terjun 7 Tingkat Batang Koban Batang Koban di Hulu Kuantan, sumber air panas di Sungai Pinang Hulu Kuantan, danau kebun Nopi di Kuantan Mudik, danau mesjid Koto Kari serta berbagai wisata budaya seperti lomba perahu bagandung di Lubuk Jambi, tradisi menangkap ikan di lubuak larangan di desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi, mandi balimau yang hampir disetiap daerah Kuantan Singingi, silat tradisional di Pangean, wisata ziarah kubur dan berbagai macam permainan adat seperti : Randai, gasing, sepak rago

tinggi, gilo luka, rarak godang, salah satu pariwisata terpopuler di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu pacu jalur.

Pacu jalur merupakan sebuah lomba perahu yang panjangnya lebih kurang 25 sampai 30 meter dengan banyak anak pendayung 40 sampai 60 orang. Menurut sejarahnya budaya pacu jalur di Rantau Kuantan sudah ada sejak abad ke-17 pada masa penjajahan Belanda. Kabupaten Kuansing (Kuantan Singingi) sering juga disebut dengan Rantau Kuantan (Hamidy, 1998: 15) atau daerah perantauan orang-orang dari Minangkabau. Pada Masa penjajahan Belanda acara pacu jalur sudah dijadikan kegiatan memperingati hari lahir Ratu Wihelmina (Ratu Belanda). Biasanya diadakan bulan November setiap tahunnya. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, festival pacu jalur ini ditujukan untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (Suwardi, 2007: 126-127). Pesta rakyat ini telah menjadi Event Pariwisata Nasional semenjak tahun 1991 (*Event Nasional Visit Indonesian Years 1991*) diikuti oleh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau serta Negara Tetangga. Pelaksanaan pesta rakyat ini dilaksanakan tanggal 23-26 Agustus setiap tahunnya.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pelaksana dari kegiatan pacu jalur setiap tahunnya dengan didukung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau telah berupaya mempromosikan tradisi yang sudah turun temurun tersebut. Keberhasilan promosi tersebut ditandai dengan penghargaan dinobatkannya pacu jalur sebagai pariwisata terpopuler di Indonesia di ajang Anugrah Pesona Indonesia pada tahun 2017. Selain itu pacu jalur juga telah masuk dan ditetapkan dalam kalender pariwisata nasional bersama dengan bono dan bakar tongkang.

Pariwisata bukan saja sebagai sumber devisa, tetapi juga merupakan faktor dalam menentukan lokasi industri dalam perkembangan daerah-daerah yang miskin sumber-sumber alam sehingga perkembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk memajukan ekonomi di daerah-daerah yang kurang berkembang tersebut sebagai akibat kurangnya sumber-sumber alam. Arus wisatawan yang berkunjung ke Kuantan Singingi untuk menyaksikan pacu jalur semakin meningkat tahunnya. Peningkatan ini terjadi karena sejalan dengan meningkatnya fasilitas pendukung yang menunjang seperti hotel-hotel, berbagai macam wahana air serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Persaingan pariwisata antar-daerah semakin kompetitif belakangan ini, untuk bisa bersaing dibutuhkan strategi yang efektif untuk mengembangkan potensi dan keunikan daerah agar dapat bersaing dengan daerah lainnya. Pacu jalur merupakan salah satu tradisi kebanggaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya dan masyakarat Provinsi Riau umumnya. Selain itu pacu jalur juga menjadi salah satu tujuan para wisatawan bahkan wisatawan dari luar negeri.

Keberadaan pacu jalur yang sudah sangat melekat di masyarakat perlu adanya upaya penguatan pariwisata melalui branding. Hal ini yang disebut dengan branding destination. Karena dengan branding ini akan mampu mengenalkan identitas pariwisata Indonesia dengan benar dan baik serta menyeluruh ke seluruh para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing.

Mengingat promosi sangat penting dalam pemasaran pariwisata, maka penelitian tentang promosi pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan sebelum, selama dan setelah promosi sehingga dapat dilihat efektifitas promosi yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini dipergunakan untuk menentukan target audience atau calon wisatawan, mengetahui informasi – informasi pariwisata yang dibutuhkan oleh para wisatawan, dan mengevaluasi keberhasilan promosi yang sedang dilakukan dan setelah selesai dilakukan.

Promosi pariwisata yang efektif mencakup pengidentifikasian target calon wisatawan yang akan dicapai pengidentifikasian tujuan komunikasi yang akan dicapai, formulasi bentuk mencapai tujuan, pilihan media untuk menyampaikan pesan dan informasi secara efektif kepada calon wisatawan yang dituju, alokasi anggaran untuk mencapai produksi dan penyampaian pesan, dan evaluasi mekanisme penjualan jasa dan produk – produk pariwisata. Untuk melihat tanggapan informan mengenai Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur diuraikan berdasarkan indikator dibawah ini:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi mensosialisasikan tentang Implementasi kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pengembangan Objek wisata khususnya Objek wisata Pacu Jalur kepada masyarakat dan pengunjung objek wisata Pacu Jalur, sebagai instansi yang memiliki tugas dan tangung jawab dalam pengembangan wilayah-wilayah yang mempunyai nilai wisata, kegiatan promosi tentunya salah satu langkah dari bagian pengembangan suatu daerah. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai 3 indikator komunikasi yaitu:

Koordinasi dengan instansi terkait, pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri dan pembuatan papan informasi pariwisata Kab/ Provinsi.

Transmisi komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyaluran informasi mengenai suatu hal dari Kepala Dinas Pariwisata ke kepala bidang bagian pariwisata dan kepada masyarakat. Dalam hal pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur, transmisi komunikasi disalurkan melalui proses penyaluran informasi dari Kepala Dinas Pariwisata kepada Kepala Bagian melalui rapat koordinasi antar bidang. Sosialisasi dalam pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur kepada masyarakat dilakukan di setiap Desa wisata termasuk lewat kegiatan (PNPM Mandiri), kegiatan ini baru dilakukan satu kali pada tahun tersebut, dan sosialisasi secara tidak langsung seperti pemanfaatan pamflet, baliho dan sebagainya, sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat kurang maksimal. Oleh karena itu Dinas Pariwisata sebaiknya melakukan sosialisasi secara langsung dengan rutin/ terus-menerus kepada masyarakat.

Kejelasan informasi berperan penting dalam menunjang kelancaran informasi antara Kepala Dinas Pariwisata selaku pembuat kebijakan dan bagian-bagiannya serta masyarakat selaku pelaksana kebijakan. Sosialisasi promosi wisata dalam rangka pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur sangat berpengaruh kepada kemampuan Dinas Pariwisata dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,

Dari sisi komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi tidak lepas dari lingkup promosi. Model komunikasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan dalam mengkomunikasikan objek wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi meliputi:

- 1. Promosi dalam bentuk *Personal selling*, yaitu berkomunikasi langsung tatap muka antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada wisatawan guna membentuk pemahaman terhadap objek wisata seperti pameran dan event, pameran biasanya diadakan sendiri maupun mengikuti pameran di daerah lain.
- 2. Iklan, merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan suatu objek wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan dan melakukan kunjungan.
- 3. *Direct marketing* bauran promosi yang bersifat interaktif, memanfaatkan suatu media iklan untuk menimbilkan respon yang terukur dan traksaksi disemua lokasi, direct marketing komunikasi promosi langsung ditujukan kepada konsumen individual, melalui wabsite/ internet dan CD/ DVD.

Peranan dari lembaga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sangatlah penting untuk mempromosikan dan pengembangan pariwisata terutama Pacu Jalur. Kegiatan pacu jalur tertuang di dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi. Serta diturunkan dalam Keputusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 303/Kpts-I/DPK/2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019. Adapun jenis kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2019 untuk menjalankan program pengembangan pemasaran pariwisata dengan cara meningkatkan promosi pariwisata daerah yang tergolong dalam indikator Koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan instansi terkait

Koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi juga merupakan suatu kegiatan bersama yang melibatkan beberapa bagian, komponen, kelompok atau organisasi diperlukan koordinasi guna untuk menyempurnakan usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan yang efektif.

Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakantindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Sehingga dapat dikatakan masalah koordinasi adalah salah satu dari masalah-masalah pemerintahan yang terpenting. Masalah kerjasama antar aparatur pemerintah dinyatakan sebagai masalah koordinasi pemerintah yang besar artinya bagi kehidupan Negara.

Sehingga koordinasi perlu digunakan untuk dapat memperbaiki hasil dari pekerjaan pemerintahan yang dirasakan perlu adanya suatu koordinasi antar lembaga pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat menjamin kerjasama antar dinas-dinas di lingkup daerah. Hubungan kerja, koordinasi dan komunikasi dari sudut pandang teknis pelaksanaan pemerintahan.

Hal ini sangat penting diterapkan dalam pelaksanaan event budaya pacu jalur, mengingat event ini merupakan event besar, maka sangat dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak demi terlaksananya acara ini. Disamping itu dengan dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dapat meminimalisir permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan event serta apabila terdapat masalah dapat diselesaikan secara bersama – sama.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata saat diwawancara mengenai Indikator Komunikasi yang dilakukan dalam mempromosikan pariwisata Pacu Jalur yaitu sebagai berikut :

"Daerah kami banyak sekali potensi wisata baik religius, budaya maupun alam. Namun wisata budaya pacu jalur merupakan event terbesar yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi, sempat beberapa kali masuk dalam kalender pariwisata, namun sekarang sudah tidak lagi. Oleh sebab itu kami memerlukan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan pelaku usaha kepariwisataan yang ada di Riau sehingga semua potensi wisata tadi bisa menarik kunjungan wisatawan ke daerah kami terutama pada pelaksanaan pacu jalur, dengan begitu kami mengharapkan pelayanan dan keterampilan sumberdaya manusia dibidang kepariwisataan juga bisa semakin meningkat"

Dalam peningkatan promosi wisata budaya pacu jalur Dinas Pariwisata melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa intansi terkait seperti yang dijelaskan dibawah ini :

Tabel IV.4 Kerjasama Dinas Pariwisata dengan Instansi Terkait Dalam Upaya Peningkatan Promosi Wisata Budaya Pacu Jalur.

No	Intansi Terkait	Jenis Kegiatan	
1	Bidang Kepariwisataan dan Dinas Pariwisata	Audiensi ke Asosiasi	
	Riau	Bidang Kepariwisataan.	
2	Pajero Sport Family (PSF) Chapter Riau	Kerjasama dalam	
		mempromosikan wisata di	
		Kabupaten Kuansing.	

3	Dinas Pariwisata Kabupaten Siak	MoU Pariwisata	
4	Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi	Pengembangan	Objek
		Wisata	
5	Humas Kabupaten Kuantan Singingi	Promosi	dan
		pengembangan	objek
		wisata	
6	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten	Promosi	dan
	Kuantan Singingi	pengembangan	objek
	277.0 101	wisata	
7	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRP)	Promosi	dan
	Kabupaten Kuantan Singingi	pengembangan	objek
		wisata	
8	Pelaku UMKM Kabupaten Kuantan Singingi	Promosi	dan
		pengembangan	objek
		wisata	
Cum	har : Dinas Parivisata Vahunatan Vuantan Singingi	2020	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat jenis kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya mempromosikan wisata budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri.

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya maka konsumen tidak akan pernah membelinya. Pada hakekatnya, promosi adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/ membujuk dan mengingatkan pasar sasaran tentang suatu produk agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan tersebut. Menurut Kotler (2002), promosi merupakan suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal dari informasi yang tepat yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga

menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran yang termasuk salah satu aspek dalam bauran pemasaran (marketing mix).

Promosi tidak hanya dilakukan untuk penjualan suatu barang tetapi juga dilakukan untuk mempromosikan suatu jasa yang salah satunya jasa pariwisata. Sehingga promosi pariwisata adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan produk pariwisata dengan permintaan wisatawan sehingga produk lebih menarik (Yoeti, 1996).

Kotler (2002) mengemukakan pendapatnya tentang fungsi promosi adalah sebagai berikut :

- a. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Perhatian dari calon pembeli harus diperoleh karena merupakan titik awal proses pengambilan keputusan di dalam membeli suatu barang dan jasa.
- b. Menciptakan dan menumbuhkan interest pada diri calon pembeli. Perhatian yang sudah diberikan oleh seseorang mungkin akan dilanjutkan pada tahap berikutnya atau mungkin berhenti. Yang dimaksudkan tahap berikutnya ini adalah timbulnya rasa tertarik dan rasa tertarik ini yang akan menjadi fungsi utama promosi.
- c. Pengembangan rasa ingin tahu (desire) calon pembeli untuk memiliki barang yang ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah seseorang tertarik pada sesuatu, maka timbul ingin memilikinya. Bagi calon pembeli merasa mampu (dalam hal harga, cara

pemakaiannya, dan sebagainya), maka rasa ingin memilikinya ini semakin besar dan diikuti oleh suatu keputusan untuk membeli.

Jika dilihat dari tujuaannya, suatu kegiatan promosi jika dilaksanakan dengan baik dapat mempengaruhi konsumen untuk tertarik memakai dan loyal pada produk yang ditawarkan tersebut. Tjiptono (2008) menerangkan bahwa tujuan promosi tersebut adalah:

- a. Menginformasikan Penjual harus menginformasikan pasar mengenai produk baru serta memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk. Dalam hal ini penjual harus menjelaskan cara kerja produk, meluruskan kesan yang salah dan menyampaikan perubahan harga pada pasar serta membangun citra perusahaan.
- b. Membujuk pelanggan sasaran Penjual harus dapat membujuk pelanggan agar dapat membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan dari merek yang ditawarkan dan terlebih lagi mendorong pembeli untuk belanja pada saat itu juga.
- c. Mengingatkan Promosi ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat dan juga untuk mengingatkan akan tempat yang menjual produk perusahaan. Tujuan ini sangat penting karena perusahaan akan mempertahankan pembeli yang ada dengan mengingatkan mereka kembali kepada kepuasan yang lalu sehingga mereka tidak berbalik kepada pesaing.

Berbagai upaya promosi telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, salah satu upaya dengan mengadakan Matta Fair di Penang Malaysia, namun acara tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan kasus Covid 19 yang melanda dunia. Sementara untuk promosi saat ini hanya dilakukan melalui akun media sosia seperti instagram yaitu sebagai berikut.



3. Pembuatan papan informasi pariwisata kabupaten dan provinsi.

Layanan informasi pada ojek wisata masih sangat kurang, maka perlu ditambahkan papan informasi sebagai sumber informasi yang dapat di mengerti dan dipahami oleh wisatawan. Karena kurangnya pelayanan untuk memberikan informasi terkait objek wisata terutama wisata budaya pacu jalur, tidak sedikit wisatawan yang hanya melihat area- area di objek wisata tanpa mengerti area tersebut apa dan digunakan untuk apa. Sehingga penambahan papan informasi ditujukan untuk dapat mewakili informasi atau untuk menggambarkan suatu area. Di kabupaten Kuantan

Singingi sendiri belum tersedia papan informasi pariwisata terutama pada event wisata budaya pacu jalur.

Berikut diuraikan tanggapan masyarakat mengenai indikator komunikasi adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Bapak Suryawan selaku Tokoh Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi :

"Jelas saya ikut mempromosikan budaya pacu jalur kepada masyarakat maupun orang yang dating dan berkunjung pada kegiatan budaya pacu jalur dalam bentuk lisan dan youtube terutama kepada keluarga dan teman — teman yang belum pernah melihat budaya pacu jalur kami menjelaskan sejarah terjadinya budaya pacu jalur ini". (Wawancara Bapak Suryawan, 10 Februari 2020).

Selanjutnya tanggapan bapak Yudha menjelaskan bahwa :

"Keistimewaan budaya pacu jalur terletak pada kebudayaan masyarakat kuansing yang memiliki sifat kegotorong royongan yang kental untuk mengadakan event budaya pacu jalur ini, untuk ikut serta langsung mempromosikan budaya pacu jalur saya pribadi belum pernah terlibat langsung, namun melalui mulut ke mulut apabila bertemu orang baru apalagi saat berada di luar kota kami selalu mengajak untuk menonton event budaya pacu jalur dan menceritakan sejarah dan kekentalan budaya yang terdapat di dalamnya". (Wawancara Bapak Yudha, tokoh masyarakat 11 Februari 2020).

Kemudian bapak Iwan menjelaskan bahwa:

"Jelas saya mengikuti budaya pacu jalur setiap tahunnya, karna pacu jalur ini merupakan satu – satunya yang bersifat tradisional, jadi budaya yang diutamakan dalam pacu jalur ini adalah sifat kegotong royongan yang kental dalam mendayung kayu dalam perlombaan, saya juga selalu mempromosikan event pacu jalur melalui media elektronik seperti facebook maupun secara langsung kepada masyarakat yang ingin mengetahui tentang budaya pacu jalur ini".

Bapak Sutan Abidin juga memberikan tanggapan sebagai berikut :

"Saya selaku masyarakat selalu mengikuti perkembangan pacu jalur sejak tahun 1997, saat itu saya masih dikelas 4 SD. Saya pernah mempromosikan pacu jalur melalui whatsapp group alumni sekolah saya, yang saat ini sudah berpencar — pencar di seluruh provinsi di Indonesia, jadi mengajak kembali teman - teman untuk melihat langsung kegiatan pacu jalur tersebut".

Sedangkan tanggapan bapak Selamat selaku Tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

"Saya selalu mempromosikan, tapi hanya dari mulut ke mulut saja. Kepada masyarakat yang berkunjung dan mengajak keluarga dan teman – teman untuk menyaksikan langsung pelaksanaan budaya pacu jalur tersebut".

Sementara bu Weni menyatakan bahwa:

"Tentu kita selalu mempromosikan event budaya pacu jalur baik secara langsung maupun menggunakan media berupa media social dan sebagainya, dan mengajak keluarga dulu yang terdekat untuk menonton langsung event budaya pacu jalur setiap tahunnya".

Berdasarkan tanggapan informan dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur berdasarkan tanggapan informan menyatakan bahwa sebagian besar tokoh masyarakat turut berpartisipasi dalam mempromosikan budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi baik itu dari mulut ke mulut, melalui media social berupa facebook, instagram, whatsapp group dan melalui audio visual berupa youtube. Serta mengajak masyarakat untuk melihat langsung event budaya pacu jalur yang kental akan sifat kegotong royongannya dalam mendayung jalur.

Hal ini juga sesuai dengan tanggapan Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata Ibu Susreti, SE., M.SE. "Pacu jalur sudah berdiri lebih kurang 1 abad sampai dengan sekarang, keistimewaannya dengan adanya pacu jalur masyarakat perantau di Kabupaten Kuantan Singingi akan pulang kampung untuk mengikuti event pacu jalur ini. Menurut saya dalam melakukan promosi belum maksimal, karna masih sampai pada skala nasional, kami ingin sekali mengajak touris – touris internasional untuk melihat event budaya pacu jalur ini".

Sementara itu, tanggapan kepala bidang pemasaran ekonomi kreatif bapak

Elvis, S.Pd menyatakan bahwa:

"Pacu jalur sudah berumur 116 tahun, dari tahun 1950an sampai saat ini sudah banyak kali, kami berupaya dalam 2 tahun ini kami ingin membuka jendela dunia dan memperkenalkan budaya pacu jalur ke Kancah Internasional, sehingga banyak touris – touris yang berkunjung dan melihat langsung event budaya pacu jalur. Karena menurut saya event budaya pacu jalur sangat unik karena dengan menggunakan 1 batang kayu dengan panjang 30 meter dan menggunakan 50 – 60 atlit yang mendayung saya rasa hal ini tidak ditemukan di tempat lain. Kita selalu mengadakan pameran dan promosi baik dalam provinsi maupun luar provinsi, serta juga menyebarkan pamphlet, leaflet, media masa, media cetak, media social dan sebagainya."

Kemudian tanggapan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Bapak H.

Nasjuneri Putra, ST menyatakan bahwa:

"Dalam mempromosikan event wisata, kita juga bekerjasama dengan Infokom yang juga bekerjasama dalam mempromosikan event wisata ini, dan juga berkoordinasi dengan beberapa forum komunitas media social yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi untuk mempromosikan budaya pacu jalur ini, itu merupakan salah satu sarana promosi diluar pamphlet, baleho, media masa, media cetak dan sebagainya. Kita berupaya agar budaya pacu jalur dikenal baik di kancah nasional maupun internasional".

Tanggapan tersebut di perkuat dengan tanggapan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bapak Dr. H. Indra Suandi, ST., M.Si.

"Potensi pariwisata memang punya daya tarik khas tersendiri terutama bidang budaya yaitu pacu jalur, pacu jalur merupakan buaya turun temurun dan membedakan adalah kultur – kultur khas yang membedakan dari yang lain, budaya pacu jalur merupakan warisan budaya tanpa bentuk. Namanya pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, tetap selalu berkoodinasi dengan dinas dan masyarakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan pariwisata tersebut. Promosi pariwisata sudah dilakukan dengan memanfaatkan media – media yang ada, kita berdayakan komunitas wisata untuk mengembangkan wisata pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi".

Berdasarkan tanggapan informan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi beserta Kepala Bidang dan Kepala Seksi menyatakan bahwa Pacu Jalur merupakan wisata budaya yang unik dan lebih mengutamakan kekentalan budaya gotong royong untuk mendayung jalur. Oleh karena itu wisata budaya pacu jalur wajib di promosikan tidak hanya di kancah nasional bahkan sampai ketingkat internasional. Oleh sebab itu Dinas Pariwisata menggunakan semua fasilitas media untuk mempromosikan budaya pacu jalur ini. Model komunikasi dari Dinas Pariwisata dilakukan melalui promosi dalam bentuk personal selling, iklan, direct marketing.

Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat menyebabkan informasi yang di sampaikan kurang maksimal. Konsistensi komunikasi akan membatu komunikasi yang disampaikan Dinas Pariwisata sehingga dapat mudah di mengerti oleh masyarakat. Para penerima komunikasi yakni masyarakat juga dapat memahami maksud dan tujuan yang sedang dibicarakan. Konsistensi komunikasi dapat mencegah timbulnya kebingungan dari pihak Dinas Pariwisata di lapangan.

Berdasarkan observasi peneliti informasi yang disampaikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan salah satu bentuk dari pengembangan objek wisata ditambah lagi dengan dukungan dari pemerintah daerah, steakholder maupun Dinas terkait sangat berpengaruh dalam kegiatan yang dilakukan. Bentuk dukungan

pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tampak jelas pada pembangunan gedung pertemuan, jembatan perahu, pembuatan talud/swering serta perbaikan sarana prasarana.

2. Sumber Daya

Organisasi atau orang yang menggunakan sumber daya untuk beragam kegiatan pariwisata misalnya di tempat kerja operator (tenaga kerja) pariwisata menggunakan sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan (sumber daya fisik), menyediakan atraksi budaya sebagai daya tarik wisatawan (sumber daya budaya), dan menjual pemandangan alam sebagai atraksi wisata (sumber daya alam). Majunya suatu wisata tentu tidak lepas dari sumber daya yang sangat berkompeten di dalamnya seperti yang tercantum dalam teori Edward III. Sumber daya yang dimaksud terbagi 4 bagian yaitu staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Staf dalam konteks penelitian ini adalah staf dari dinas pariwisata yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur, Dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki staf yang berjumlah 22 staf untuk bidang pariwisata terdapat 5 staf dan dibantu oleh Sketariat yang terdiri dari tenaga honorer.

Sumberdaya dalam penelitian ini tidak hanya terfokus pada sumberdaya manusia saja, namun juga dibarengi dengan kelengkapan informasi, fasilitas dan infrastruktur, jaringan dan sebagainya. Dibawah ini dijelaskan jenis – jenis

sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dalam mempromosikan wisata budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa salah satu tujuan kegiatan kepariwisataan adalah upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Salah satu konsep yang menjelaskan peranan komunitas dalam pembangunan pariwisata adalah *Community Based Tourism* (CBT). Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat.

Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat). Konsep *Community Based Tourism* (CBT) lazimnya digunakan oleh para perancang pembangunan pariwisata strategi untuk memobilisasi komunitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sebagai patner industri pariwisata. Tujuan yang ingin diraih adalah pemberdayaan sosial ekonomi komunitas itu sendiri dan meletakkan nilai lebih dalam berpariwisata,

khususnya kepada para wisatawan. Trend dunia global saat ini pengembangan community based tourism telah dibakukan sebagai alat dan strategi pembangunan tidak hanya terbatas di bidang pariwisata, melainkan dalam konteks pembangunan Negara, dengan membuka kesempatan dan akses komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pemanfaatan teknologi dan informasi merupakan salah satu upaya untuk mengeliminasi keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat. Informasi yang tersedia melalui media internet saat ini sangat banyak dan dapat memberikan inspirasi serta peluang untuk mengembangakan usaha. Internet tidak hanya menjadi media pemasaran yang efektif dan murah saja, tapi juga dapat memberikan informasi mengenai produk-produk yang dapat dihasilkan oleh masyarakat.

Pemasaran melalui internet atau eCommerce baik yang bersifat B2B, B2C atau C2C saat ini berkembang dengan demikian pesat. Potensi ekonomi yang terdapat di dunia eCommerce sangat besar. Selain itu, pemasaran dengan mengoptimalkan kebareadaan social media dapat menjadi salah satu pemicu perkembangan yang efektif. Peluang penggunaan eCommerce dan media sosial ini seharusnya dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat yang bertempat tinggal di berbagai lokasi wisata. Masyarakat setempat yang berada dilokasi wisata pada saat ini sering memanfaatkan tempat tinggalnya untuk disewakan kepada wisatawan yang berkunjung. Hal ini terjadi terutama pada saat musim padat pengunjung dimana pengunjung mengalami kesulitan dalam mendapatkan tempat menginap.

Dengan konsep CBT, mekanisme ini dapat dirubah dengan menawarkan kepada pengunjung untuk mendapatkan pengalaman berlibur dengan membaur dengan masyarakat desa setempat, dimana obyek-obyek wisatanya dikelola oleh komunitas budaya masyarakat sekitar. Masyarakat setempat tidak hanya menikmati kue kunjungan wisata pada saat musim padat liburan saja, tetapi bisa menikmatinya sepanjang tahun. Dengan konsep ini diharapkan tingkat sadar wisata masyarakat meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas lokasi wisata tersebut.

2. Pelatihan Pemandu wisata terpadu

Berkembangnya industri pariwisata yang semakin pesat sebaiknya juga diimbangi dengan pengembangan sumber daya manusianya, karena manusia merupakan penggerak seluruh kegiatan kepariwisataan dan menjadi faktor terpenting. Sumber daya manusia dalam bidang pariwisata meliputi pengelola kawasan wisata, pemandu wisata, dan semua yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata. Kinerja SDM merupakan salah satu faktor terpenting yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan pariwisata. Terutama kinerja pemandu wisata karena mereka merupakan orang yang pertama kali dijumpai oleh wisatawan.

Pemandu wisata memiliki peranan yang sangat penting karena selama dalam masa liburannya wisatawan lebih banyak bersinggungan atau beradaptasi dengan pemandu wisata. Baik buruknya kesan yang diterima wisatawan banyak ditentukan oleh peran seorang pemandu wisata. Seorang pemandu wisata profesional akan bisa membantu wisatawan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan. Dengan pengalamannya seorang pemandu wisata juga mampu untuk memberikan pelayanan,

petunjuk, informasi dan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang wisatawan. Dengan pengalamannya dia juga merupakan sumber informasi penting tentang diri wisatawan, menyangkut kebutuhan, keinginan dan standard pelayanan wisatawan yang akan sangat bermanfaat untuk pengembangan kepariwisataan lokal maupun nasional. Selain itu, pemandu wisata yang profesional akan mampu menciptakan citra kawasan wisata sehingga mereka sekaligus berperan sebagai ujung tombak promosi dan pemasaran produk wisata, baik yang berupa obyek wisata alam dan budaya maupun produk wisata lainnya.

Peran ganda pemandu wisata sebagai information provider dan sekaligus sebagai ujung tombak promosi destinasi atau daerah tujuan wisata masih belum diperhitungkan untuk menarik wisatawan. Di samping itu pemahaman tentang peningkatan daya tarik obyek wisata melalui peran pemandu wisata masih terbatas. Keberadaan pemandu wisata akan meningkatkan pemahaman wisatawan terhadap obyek wisata dan masyarakat sekitar yang dikunjungi sehingga dapat mendukung upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam maupun budaya sebagai obyek wisata yang sering dilakukan oleh wisatawan. Pemandu wisata yang mampu memberikan interpretasi dan informasi yang memadai akan dapat menciptakan kepuasan pada diri wisatawan dan dapat berlanjut pada terjadinya kunjungan ulang ke obyek-obyek wisata yang dikunjungi tersebut.

Untuk menjadi pemandu yang professional pasti banyak proses yang harus dilalui, tidak hanya didapat dari sekolah/kuliah maupun kursus tetapi didapat dari pengalaman yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Pemandu wisata yang

professional harus memiliki kompetensi yang memadahi. Dalam UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dimaksud "kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja". Agar pemandu wisata memiliki kompetensi yang memadai perlu dilakukan pelatihan sehingga pemandu wisata memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang baik. Setelah mengikuti pelatihan kemudian diterapkan dalam pekerjaannya atau profesinya sebagai pemandu wisata.

Dikabupaten Kuantan Singingi terdapat 80 orang yang bertugas sebagai pemandu wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Setiap pemandu wisata diwajibkan mengikuti pelatihan mengenai pemandu wisata yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Mengingat pentingnya pemandu wisata dalam meningkatkan jumlah wisatawan di Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sendiri menganggarkan dana sebesar Rp. 190.000.000,. (seratus Sembilan puluh juta rupiah) setiap tahunnya dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia dalam pelatihan pengembangan dan pengelolaan objek wisata.

3. Peningkatan SDM pariwisata

Keberadaan SDM berperanan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (employment). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional

yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

SDM merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata. Pentingnya SDM di sektor pariwisata adalah manusia (*people*) merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Khususnya di organisasi berbasis jasa (*service-based organization*), SDM berperan sebagai faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan kinerja. Pada beberapa industri, faktor manusia berperan penting dan menjadi faktor kunci sukses terhadap pencapaian kinerja. Seperti pada industri pariwisata, dimana perusahaan memiliki hubungan langsung yang bersifat intangible (tak berwujud) dengan konsumen yang sangat bergantung pada kemampuan individu karyawan dalam membangkitkan minat dan menciptakan kesenangan serta kenyaman kepada para konsumennya.

Demikian juga atraksi wisata di suatu daerah tujuan wisata, intinya merupakan faktor manusia yang akan menentukan apakah para pengunjung (wisatawan) akan memperoleh pengalaman total dan akan berkunjung kembali. Pengembangan SDM di industri pariwisata saat ini menghadapi tantangan global yang memerlukan solusi dengan menembus batasan-batasan Negara, wilayah dan benua. Salah satu solusi yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki suatu Negara termasuk Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang tepat.

Peranan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Hal ini bermuara pada kenyataan dimana manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi. Manusia membuat tujuan-tujuan inovasi dan pencapaian tujuan organisasi. Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya organinasi lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan perusahaan.

Pendidikan kepariwisataan merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan potensi kepariwisataan (kawasan wisata), karena bidang ini memerlukan tenaga kerja terampil yang secara terus menerus harus dikembangkan. Salah satu masalah dalam mengembangkan pariwisata adalah tidak tersedianya fasilitas yang cukup untuk menunjang pendidikan pariwisata. Tenaga kerja yang cakap, terampil, memiliki skill tinggi dan pengabdian pada bidangnya (professional) menjadi kebutuhan mutlak dalam bersaing di pasaran global. Produk industri pariwisata adalah "jasa", oleh karena itu penekanannya harus pada segi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Dalam industri pariwisata, kualitas pelayanan merupakan indikator utama yang menunjukkan tingkat professionalnya. Pengembangan pengetahuan tenaga kerja ditekankan pada 3 hal pokok:

 Pengembangan pengetahuan tentang tata cara pelayanan yang berkaitan dengan bervariasinya kegiatan pariwisata, misalnya pelayanan di hotel, berbeda dengan pelayanan di tempat rekreasi atau dalam perjalanan wisata.

- Pengembangan pengetahuan tentang peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam bidang pelayanan.
- 3. Pengembangan SDM yang berkaitan dengan pengembangan sikap, perilaku, sopan santun, dan sebagainya.

Ketiga hal tersebut setiap saat selalu berubah dan mengarah pada kemajuan, sehingga ketiganya harus selalu ditingkatkan khususnya melalui pendidikan, yang juga akan mempengaruhi daya serap industri. Daya serap industri pariwisata adalah kemampuan industri pariwisata dalam menyerap dan menerima karyawan yang berasal dari lembaga pendidikan umum dan pendidikan kejuruan untuk bekerja dalam lingkup pekerjaan kepariwisataan.

Dengan demikian dari keseluruhan dimensi yang ada, maka terlihat bahwa sumberdaya manusia bertumpu pada dua indikator penting yaitu tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pemandu wisata dan tingkat keterampilan yang berkaitan dengan bidang kerja yang ditangani pemandu wisata tersebut.

4. Evaluasi pelaksanaan program pengembangan promosi wisata.

Program pengembangan pariwisata merupakan program yang sasarannya mengarah pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur budaya dan pariwisata. Program tersebut merupakan program pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan objek wisata didaerah. Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata, perlu dilakuka pemantauan dan evaluasi untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan program pariwisata nasional. Evaluasi dapat memberikan informasi tidak hanya mengenai perkembangan inputs dan outputs pelaksanaan program, tetapi

juga meliputi hasil, manfaat dan dampak serta faktor – faktor apasaja yang mempengaruhi perkembangan potensi pariwisata.

Evaluasi dapat dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program untuk mengukur indikator—indikator, yaitu; menentukan apakah tujuan umum dan tujuan khusus program telah tercapai, menentukan apakah terdapat manfaat dari program dan menentukan suksesan keseluruhan pelaksanaan program. Dalam Peraturan Perintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional (pasal1) menjelaskan bahwa kepariwistaan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Maka dengan demikian, seharusnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memiliki peran dalam pengembangan pariwisata memberikan perhatian yang lebih terhadap pariwisata, baik itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap wisatawan.

Untuk lebih jelasnya mengenai sumberdaya dalam pengembangan wisata budaya pacu jalur, berikut diuraikan tanggapan masyarakat mengenai indikator sumber daya adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Bapak Suryawan selaku Tokoh Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi :

"Saya rasa pemerintah selalu meningkatkan kinerjanya terutama dalam bidang teknologi, di masa sekarang yang sudah serba canggih memang dituntut untuk memahami teknologi karna apapun berita dapat dengan mudah diakses melalui social media, sehingga sudah seharusnya pemerintah selalu update dengan kemajuan teknologi". (Wawancara Bapak Suryawan, 10 Februari 2020).

Selanjutnya tanggapan bapak Yudha menjelaskan bahwa:

"Kami melihat pemerintah cukup antusias dalam mempromosikan budaya pacu jalur ini, karna kami sering melihat pamphlet dan baleho yang terpasang di setiap sudut di Kabupaten Kuantan Singingi ini, bahkan kami juga sering melihat berita — berita online yang tentang budaya pacu jalur ini". (Wawancara Bapak Yudha, tokoh masyarakat 11 Februari 2020)."

Kemudian bapak Iwan menjelaskan bahwa:

"Selama ini kami saya rasa upaya pemerintah sudah cukup optimal dalam mempromosikan budaya pacu jalur, kami melihat menteri — menteri Negara pun turut hadir dalam memeriahkan even budaya pacu jalur ini (Wawancara dengan bapak Iwan, Tokoh masyarakat 11 Februari 2020)".

Bapak Sutan Abidin juga memberikan tanggapan sebagai berikut :

"Saya ra<mark>sa sumber daya manusia dalam m</mark>engelola pariwisata sudah cukup memadai, dan juga selalu aktif dalam mengadakan event budaya pacu jalur ini setiap tahunnya (Wawancara dengan Badap Sutan Abidin, 11 Februari 2020)".

Sedangkan tanggapan bapak Selamat selaku Tokoh masyarakat menyatakan bahwa :

"Saya rasa sudah memadai dari segi sumber daya, dan juga dari segi mempromosikan event budaya pacu jalur sudah cukup optimal, promosi juga selain dalam bentuk tulisan, promosi juga gencar dilakukan melalui aplikasi – aplikasi media social".

Sementara bu Weni menyatakan bahwa:

"Dari segi pemerintah saya rasa sudah cukup optimal dalam mempromosikan budaya pacu jalur ini, pemerintah juga sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam upaya mempromosikan event budaya pacu jalur tersebut".

Berdasarkan tanggapan informan dalam penelitian mengenai indikator sumber daya pada umumnya sudah cukup optimal, pemerintah selain sudah menggunakan kecanggihan teknologi dalam mempromosikan budaya pacu jalur dan memanfaatkan berbagai media serta aplikasi – aplikasi di dunia maya untuk mempromosikan budaya pacu jalur ini.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata Ibu Susreti, SE., M.SE juga memberikan tanggapan sebagai berikut :

"Dari segi sumber daya dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi menurut kuantitas sudah terpenuhi pada umumnya, namun apabila dilihat dari segi kualitas masih belum maksimal, masih banyak pegawai yang belum memahami tugas dan fungsinya. Serta belum cakap untuk melakukan promosi serta kurang aktif dalam melaksanakan tugas, terutama dalam mempromosikan event – event yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini".

Sementara itu, tanggapan kepala bidang pemasaran ekonomi kreatif bapak Elvis, S.Pd menyatakan bahwa :

"Dari segi pemanfaatan teknologi tentu kami selalu meng-upgrade perkembangan teknologi terutama untuk mempromosikan budaya di Kabupaten Kuantan Singingi ini, karena pada zaman sekarang masyarakat lebih suka melihat informasi dengan menggunakan gadget disbanding harus membaca Koran, dari segi sumberdaya manusia kami juga selalu mengembangkan kemampuan pegawai dengan memberikan pelatihan — pelatihan agar pegawai pada umumnya dapat memahami pentingnya promosi dalam meningkatkan pengunjung pada event — event wisata di Kabupaten Kuantan Singingi ini"

Kemudian tanggapan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Bapak H.

Nasjuneri Putra, ST menyatakan bahwa :

"Dari segi sumber daya, saya kira sudah terpenuhi. kita juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Infokom dalam mempromosikan event wisata ini, dan juga berkoordinasi dengan beberapa forum komunitas media social yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi untuk mempromosikan budaya pacu jalur ini, itu merupakan salah satu sarana promosi diluar pamphlet, baleho, media masa, media cetak dan sebagainya. Kita berupaya agar budaya pacu jalur dikenal baik di kancah nasional maupun internasional".

Tanggapan tersebut di perkuat dengan tanggapan Kepala <mark>Di</mark>nas Pariwisata dan Kebudayaan Bapak Dr. H. Indra Suandi, ST., M.Si.

"Dari segi sumberdaya pada dasarnya sudah memenuhi secara kuantitas, namun secara kualitas kami selalu berupaya untuk meningkatkan dalam segala bidang, seperti memanfaatkan teknologi dalam pemasaran pariwisata, kami juga selalu melakukan pelatihan — pelatihan kepada pengelola tempat — tempat wisata dan juga pemandu wisata karena di Kabupaten Kuantan Singingi ini masih banyak wisata budaya yang merupakan peninggalan turun temurun dan mempunyai sejarah yang panjang, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menggali informasi dari pemandu wisata yang sudah disediakan. Serta kami selalu mengevaluasi perkembangan wisata setiap tahunnya".

Berdasarkan tanggapan informan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa dari segi kuantitas sumber daya pada umumnya sudah memenuhi, namun dari segi kualitas masih perlu peningkatan lagi, Dinas Pariwisata sendiri sudah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kapasitas diantaranya meningkatkan pemanfataan teknologi dalam mempromosikan pariwisata dan juga meningkatkan kemampuan SDM yang bertugas mengelola tempat wisata dengan mengikut sertakan dalam pelatihan – pelatihan yang diadakan.

Dinas Pariwisata dapat mengetahui tahap pengembangan objek wisata di daerah lain melalui sosial media, teman dan bisa langsung mengunjungi pelatihan kepariwisataan di luar daerah. Koordinasi antar Kepala Dinas pariwisata dan Kepala Bidang dalam pengembangan objek wisata di lakukan dengan memanfaatkan bantuan teknologi Seperti: blogspot, email, video dan conference. Koordinasi antar badan pelaksana kebijakan dengan memanfaatkan teknologi dilakukan untuk mengefektifkan waktu tapi mekanisme rapat tetap memegang peranan penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.

Berdasarkan observasi peneliti untuk menjadi tolak ukur pengembangan perlu adanya survei dari daerah lain namun implementasi kebijakan sangat baik dilakukan apabila melaksanakan perumusan informasi pengembangan secara tatap muka (rapat). Dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki wewenang tertentu di masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Disposisi

Kecendrungan atau sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pariwista berperan penting dalam sukses tidaknya suatu kebijakan. Karena sudut pandang seseorang berbeda dalam suatu hal. Oleh karena itu staf-staf dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata didasarkan pada sikap dan pandangan yang dimiliki. Sikap positif yang ditunjukkan berdasarkan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya dan patuh akan perintah Kepala Dinas. Sedangkan sifat negatif cenderung malas-malasan, kurang motivasi, melakukan perlawanan terhadap perintah Kepala Dinas Pariwisata. Dalam pengembangan bidang pariwisata setidaknya ada dua unsur yang mendukung perkembangan sektor pariwisata yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata penunjang event pacu jalur.

Promosi pariwisata budaya pacu jalur masih tergolong kurang efektif yang terlihat dari belum adanya peningkatan arus kunjungan wisatawan budaya pacu jalur yang signifikan. Sistem promosi yang dijalankan pada kepariwisataan budaya pacu jalur ini sekarang hanya terbatas pada sistem promosi dengan menggunakan paflet dan buflet pada acara vestifal baik pada tingkat regional, profinsi maupun nasional. Selain pengadaan Paflet dan Buflet dalam promosi di Kabupaten Kuantan Singingi. Media telekomunikasi seperti pemanfaatan website juga telah dilakukaan. Media promosi yang telah dilakukan oleh bidang Pariwisata melalui situs internet. Informasi yang diberikan melalui situs internet tersebut saat ini masih banyak keterbatasan informasi yang diberikan untuk mempromosikan dan mengenalkan pariwisata budaya pacu jalur kepada masyarakat luas.

Dalam usaha peningkatan kualitas pariwisata budaya pacu jalur diperlukan kerjasama yang baik dengan para stakeholder bidang pariwisata seperti dengan biro perjalanan, perhotelan, dan juga dengan pihak ketiga yang lain. Kerjasama ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pariwisata budaya pacu jalur karena dalam usaha pengembangan pariwisata diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dan termasuk juga dengan pemangku kepentingan bidang pariwisata atau stakeholder bidang parwisiata. Menurut salah satu staff bidang pariwisata bahwa kerjasama yang baik dengan para stakeholder sudah dilakukan seperti dengan membuka komunikasi dan membuka kerjasama serta memperlibatkan mereka dalam penyusunan program pengembangan pariwisata maupun promosinya.

2. Pameran gebyar nusantara.

Pameran Gebyar Wisata & Budaya Nusantara adalah satu-satunya pameran wisata di Indonesia yang menampilkan obyek wisata daerah dari Sabang sampai Merauke. Pameran "Gebyar Wisata & Budaya Nusantara" diselenggarakan sejak 2003 dengan tujuan:

- 1. Mempromosikan objek wisata daerah di Indonesia seperti obyek wisata pegunungan, pertanian, lingkungan, seni dan budaya, sejarah, belanja, kuliner, pantai, kepulauan dan alam bawah laut ke masyarakat Indonesia dan internasional.
- 2. Mendorong masyarakat Indonesia untuk memilih berwisata ke berbagai daerah daripada ke luar negeri.
- 3. Meningkatkan kunjungan wisata untuk mencapai target kunjungan 17 juta wisatawan asing dan 275 juta wisatawan nusantara.
- 4. Mendorong pengembangan obyek wisata daerah secara maksimal untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan baik dari negeri sendiri maupun juga negara asing
- Meningkatkan rasa cinta tanah air bagi terwujudkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Jadi dengan mengikuti acara dalam pameran tersebut, secara tidak langsung sudah mempromosiikan wisata budaya pacu jalur ke dunia internasional.

Disposisi dibagi menjadi 2 bagian yaitu penetapan staf dan hambatan yang dijumpai. Penetapan staf yang terjadi di Dinas Pariwisata dan kebudayaan

berdasarkan lulusan Pegawai Negeri Sipil pada umumnya masih kurang memiliki keahlian khusus di bidang pariwisata sebagai kriteria masuk dalam bidang tersebut, sehingga pemahaman di bidang pariwisata kurang dimiliki staf. Analisa peneliti bahwa perekrutan staf dilakukan pada saat pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur, tidak sepenuhnya berdasarkan keahlian di bidang pariwisata, sehingga pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur kurang bejalan dengan baik.

Berikut diuraikan tanggapan masyarakat mengenai indikator disposisi adalah sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Bapak Suryawan selaku Tokoh Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi :

"Mengenai kerjasama pemerintah, saya rasa tentu pemerintah bekerjasama dengan pihak terkait, karena ini merupakan event yang cukup besar tentu melibatkan banyak pihak untuk mengelolanya agar eventnya dapat berjalan dengan lancar". (Wawancara Bapak Suryawan, 10 Februari 2020).

Selanjutnya tanggapan bapak Yudha menjelaskan bahwa:

"Saya rasa pemerintah tentu bekerjasama dengan pihak lain, mengenai pameran dinas pariwisata pernah mengadakan pameran di Kabupaten Kuantan Singingi, tapi untuk pergi ke daerah lain saya kurang tau". (Wawancara Bapak Yudha, tokoh masyarakat 11 Februari 2020)."

Kemudian bapak Iwan menjelaskan bahwa:

"Tentu pemerintah bekerjasama dengan pihak – pihak lain dalam menyelenggarakan event ini, karna ini merupakan event besar dan sudah bertahun – tahun diadakan sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk melancarkan acara tersebut (Wawancara dengan bapak Iwan, Tokoh masyarakat 11 Februari 2020)".

Bapak Sutan Abidin juga memberikan tanggapan sebagai berikut :

"Menurut saya iya, karna tidak mungkin pemerintah bisa melakukan kegiatan ini sendiri tanpa melibatkan banyak pihak (Wawancara dengan Badap Sutan Abidin, 11 Februari 2020)".

Sedangkan tanggapan bapak Selamat selaku Tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

"Suda<mark>h pasti melakukan kerjasama dengan pih</mark>ak lain, serta juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam melancarkan acara ini. Kalau mengadakan pameran gebyar ada sih, tapi agak jarang". LAMRIAL

Sementara bu Weni menyatakan bahwa:

"Saya rasa pemerintah bekerjasama dengan pihak lain dan juga pasti melibatkan banyak pihak dalam mengembangkan budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi ini".

Berdasarkan tanggapan informan dalam penelitian mengenai disposisi diketahui bahwa pemerintah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengadakan event budaya pacu jalur ini. Mengingat pacu jalur merupakan even besar, tentu membutuhkan banyak pihak demi lancarnya even tersebut.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata Ibu Susreti, SE., M.SE juga memberikan tanggapan sebagai berikut :

"Sudah pasti kami melibatkan banyak pihak dalam melaksanakan event budaya pacu jalu<mark>r ini, terutama dari</mark> partisipasi masyarakat demi terselenggaranya event ini secara maksimal. Pameran gebyar selalu kami ada kan setiap tahun namun lokasinya berbeda – beda di luar kabupaten Kuantan Singingi, hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat luar untuk dating dan menghadiri event ini".

Sementara itu, tanggapan kepala bidang pemasaran ekonomi kreatif bapak Elvis, S.Pd menyatakan bahwa:

"Kita tentu bekerjasama dengan pihak lain, bahkan melibatkan banyak pihak dari sebelum dimulainya kegiatan atau pada saat perencanaan kegiatan sampai pada akhir kegiatan tetap melibatkan banyak pihak terutama dari kalangan masyarakat sehhingga acara ini berjalan dengan lancar"

Kemudian tanggapan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Bapak H.

Nasjuneri Putra, ST menyatakan bahwa :

"Tentu kita melibatkan banyak pihak untuk setiap event — event yang diadakah di Kabupaten Kuantan Singingi ini, dimulai dari masyarakat untuk bersama — sama melaksanakan kegiatan ini, pameran selalu kami adakan setiap tahunnya namun berada di luar Kabupaten Kuansing, semua ini dilakukan karna menarik minat masyarakat luar untuk melihat langsung event tersebut".

Tanggapan tersebut di perkuat dengan tanggapan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bapak Dr. H. Indra Suandi, ST., M.Si.

"Tidak ada satu dinas pariwista pun yang mampu mengelola sendiri kegiatan – pariwisata, sudah pasti melibatkan banyak pihak dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Pameran selalu kami adakan disetiap acara – acara baik di dalam Kabupaten Kuantan Singingi maupun di luar kabupaten Kuantan Singingi sendirii, hal ini untuk menarik minat masyaralat luar untuk melihat langsung event budaya yang berumur lebih dari 1 abad itu".

Berdasarkan pernyataan informan diatas diketahui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu melakukan kerjasama dengan melibatkan banyak pihak dalam mengelola event – event wisata di Kabupaten Kuantan Singingi, karena tidak mungkin setiap event dikerjakan sendiri oleh Dinas Pariwisata, bahkan juga sangat memerlukan partisipasi penuh dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Hambatan yang di Jumpai Pelaksana Kebijakan dalam Pengembaangan objek wisata Budaya Pacu Jalur. Pengembangan dan pengelolaan Budaya Pacu Jalur masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah sihingga pengelolaan objek wisata Budaya Pacu Jalur belum di lakuakan secara baik, hal ini belum dapat

diasumsi sebagai kawasan wisata yang produktif bagi pendapatan masyarakat dan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut analisa peneliti pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur yang di jalankan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan masih banyak hambatan-hambatan yang menjadi tugas rumah pemerintah daerah seperti, adanya pemanaham bahwa masih kurangnya retribusi yang di peroleh dari objek wisata Budaya Pacu Jalur menjadi salah satu alasan hambatan pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur dan seperti fasilitas yang belum memadai, pendanaan hanya bersumber dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi saja, kurangnya promosi dan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengembangan objek wisata berupa sarana prasarana penunjang pengembangan objek wisata juga terbatas (tempat sampah, tempat duduk ,MCK dan air bersih masih sangat minim), kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan permodalan yang cukup untuk pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur serta belum adanya investor yang ikut bergabung dalam pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur, semua gejala-gejala ini menjadi faktor utama kurang maksimalnya pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur.

4. Struktur Birokrasi

Struktur didefinisikan sebagai pola hubungan di antara elemenelemen sosial yang meliputi orang, posisi, dan unit-unit organisasi di mana mereka berada (Hatch, 1997, dalam Kusdi, 2009). Struktur organisasi merupakan faktor penting dalam berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan karena berkaitan dengan bagaimana organisasi berelasi untuk bisa menggapai tujuantujuan yang diinginkan. Agar proses

yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif dan efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, struktur birokrasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu: kejasan tupoksi dan SOP.

Menurut Edwards, dua karakter birokrasi adalah prosedur kerja standard dan fragmentasi Prosedur kerja standard berkaitan dengan sistem kerja dari organisasi pelaksana yang tersusun sebagai pemandu dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Terminologi prosedur kerja yang banyak dipakai saat ini adalah prosedur operasional standard (Standard Operating Procedure/SOP). Adapun fragmentasi timbul karena adanya konflik kepentingan dan tekanan dari berbagai pihak terhadap birokrasi, misalnya dari organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, atau badan pelaksana yang lain. Fragmentasi juga bisa timbul jika organisasi pelaksana terdiri atas banyak elemen. Antar-organisasi pelaksana bisa terfragmentasi menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing mengingat birokrasi tak lain juga merupakan satu lkekuatan politik tersendiri.

Dalam struktur organisasi kita bisa melihat bagaimana pengatur hubungan antar elemen di organisasi untuk mendukung terwujudnya tujuan organisasi sesuai dengan fungsinya masing — masing. Didalam struktur organisasi diatur pola hubungan pertanggung jawaban, wewenang, dan hal — hal terkait kerja yang berorientasi pada tujuan, elemen struktur setidaknya dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai struktur birokrasi, penulis melakukan wanwancara dengan Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata Ibu Susreti, SE., M.SE juga memberikan tanggapan sebagai berikut :

"Tentu sudah ada, dan tupoksi masing — masing Dinas diatur langsung oleh Bupati melalui surat keputusan bupati, sehingga kami melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan. Mengenai SOP dalam bekerja juga sudah ada, namun SOP yang mengatur langsung pelaksanaan event budaya pacu jalur sampai saat ini belum tersedia".

Sementara itu, tanggapan kepala bidang pemasaran ekonomi kreatif bapak Elvis, S.Pd menyatakan bahwa:

"Kami selalu melaksanakan tugas dengan berpedomankan Tugas dan Fungsi yang telah ditetapkan, mengenai SOP tentang pelaksanakan pacu jalur belum tersedia, karna ini sudah menjadi kebiasaan tahunan dan sudah dilaksanakan satu abad lebih sehingga masing – masing sudah memahami setiap prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut"

Kemudian tanggapan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Bapak H.

Nasjuneri Putra, ST menyatakan bahwa :

"Kami tentu melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan, mengenai SOP dalam bidang pemasaran juga sudah ada, namun dari segi pelaksanaan tidak ada SOPnya".

Tanggapan tersebut di perkuat dengan tanggapan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bapak Dr. H. Indra Suandi, ST., M.Si.

"Tugas pokok dan fungsi semua OPD di Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah ditetapkan oleh bupati melalui surat keputusan, sehingga tidak bisa semena — mena dalam menjalankan tugas dan sudah ditetapkan setiap bidangnya dan dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas tersebut. Sampai saat ini belum ada SOP yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pacu jalur. Namun kedepannya perlu dipertimbangkan lagi untuk pembuatan SOP pacu jalur ini".

Dalam konteks implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur, tidak ada SOP yang khusus mengatur objek wisata Budaya Pacu Jalur hanya berpedoman berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi. Analisa peneliti mengenai SOP yang digunakan dalam pegembangan Budaya Pacu Jalur masih kurang efektif karena tidak adanya standar operasi sistem yang khusus dalam pengelolaan Budaya Pacu Jalur. Hal ini mengakibatkan pengembangannya kurang berkembang, program pengembangan pariwisata secara umum sesuai dengan RPJMD, namun pengembangan objek wisata yang terkhusus pada Budaya Pacu Jalur belum ada SOP yang mengaturnya dan Pelaksanaannya hanya berdasarkan pada tupoksi dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut Edward III dalam Tahir (2014), tanggung jawab disebarkan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi fragmentasi ini menyebabkan terjadinya persebaran tangung jawab diantara badan pelaksana implementasi kebijakan. Seperti yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur dengan pembagian tugas sesuai dengan standarinisasi kemampuan yang dimiliki tiap bidang organisasi. Informan mengatakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari DPRD hingga masyarakat umum. Dan informan juga menambahkan bahawa peneliti termasuk pengawas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan Budaya Pacu Jalur karena peneliti meneliti kesesuaian pelaksana kebijakan dengan kebijakan yang ada.

5.2.2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur

Beberapa hambatan yang dihadapi dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengembangan objek wisata Budaya Pacu Jalur juga kadang terbentur dari kendalah dan permasalahan-pemasalahan yang bisah dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Belum ada peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan event budaya pacu jalur, mengingat event budaya pacu jalur merupakan sebuah event besar yang sudah lama dilaksanakan bahkan sudah menginjak usia 1 abad lebih seharusnya sudah ada peraturan bupati yang dikhususkan dalam pelaksanaan event budaya pacu jalur tersebut.
- 2. Keterbatasan dana dalam pengembangan objek wisata, Sarana dan prasarana penunjang pariwisata masih relative kurang. Mengingat event budaya pacu jalur merupakan event besar yang ditonton oleh ribuan pengunjung namun lokasi yang digunakan belum memadai, infrastruktur masih sangat terbatas, sehingga menyebabkan tidak adanya kenyamanan dalam menonton pacu jalur.
- 3. Minimnya upaya pemerintah untuk bekerjasama dengan pihak swasta terutama bidang perhotelan, sehingga masih minimnya tempat menginap bagi wisatawan di luar kabupaten Kuantan Singingi. Mengingat dengan mengadakan kerjasama dengan pihak perhotelan dapat juga meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan event wisata budaya pacu jalur.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Mempromosikan Budaya Pacu Jalur belum terlaksana dengan optimal. Kenyataan ini terlihat pada birokrasi pemerintah yang kerap kali disepelekan dan hal ini membuat pengembangan objek wisata Pacu Jalur kurang berkembang.

Strategi pengembangan Pacu Jalur dari berbagai indikator harus adanya kerjasama antara pengelola kebijaksanaan (stakeholder) dan pelaksana kebijakan serta pengawas kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pengembngan objek wisata budaya pacu jalur yang dilihat dari ke 4 (empat) indikator, yakni disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata pacu jalur belum optimal, karena bentuk promosi yang digunakan masih sangat terbatas, masih pada sektor internal saja berupa spanduk dan papan baleho, sementara promosi keluar daerah maupun pada kancah internasional masih sangat terbatas.
- 2. Sumberdaya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terlebih khusus di bidang pariwisata dapat di simpulkan belum optimal, karena minimnya

anggaran yang digunakan pemerintah dalam pengembangan objek wisata terutama kesediaan sarana dan prasarana yang tersedia pada objek wisata budaya pacu jalur, belum adanya kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta terutama bidang perhotelan, sehingga tempat menginap bagi wisatawan di Luar Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat terbatas.

- 3. Sikap Pelaksana di Dinas pariwisata dan Kebudayaan dapat disimpulkan belum optimal dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan event budaya pacu jalur, sebagian masyarakat beranggapan pelaksanaan event budaya pacu jalur ini merupakan tugas pemerintah, padahal event budaya pacu jalu merupakan event besar yang sudah ada sejak turun temurun.
- 4. Struktur Birokrasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat disimpulkan belum optimal karena belum ada SOP yang mengatur pelaksanaan event budaya pacu jalur dan belum tersedianya papan papan informasi yang memberikan informasi kepada pengunjung wisata budaya pacu jalur.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dan dalam upaya mengimplementasikan kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pengembangan objek wisata budaya pacu jalur, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Agar komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata budaya pacu jalur dapat berjalan dengan baik, Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan untuk lebih aktif dalam memberikan promosi terutama diluar Kabupaten Kuantan Singingi bahkan sampai ke kancah internasional. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan event wisata budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2. Diharapkan kepada pemerintah membuat sebuah peraturan yang dikhususkan untuk event budaya pacu jalur, mengingat event ini merupakan event besar namun sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur secara langsung pelaksanaan event tersebut.
- 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat mempertahankan karakter yang telah dipupuk bersama dalam mengimplimentasikan kebijakan pengembangan objek wisata budaya pacu jalur agar tetap memberi pengembangan objek wisata yang baik.
- 4. Pemerintah diharapkan untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta, mengingat terbatasnya anggaran pemerintah dalam pelaksanaan event budaya pacu jalur ini sehingga dengan melaksanakan kerjasama dapat membantu anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan event dan juga dengan mengadakan kerjasama dengan swasta terutama bidang perhotelan juga dapat meningkatkan jumlah pengunjung serta dapat meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Kuantan Singingi.

5. Diharapkan kepada Dinas pariwisata dan Kebudayaan agar dapat membuat SOP dalam pelaksanaan event budaya pacu jalur sehingga dalam ada yang bisa dijadikan standar dalam pelaksanaan setiap tahunnya, mengingat event ini merupakan event yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- AG,. Subarsono, 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi).

 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
 Kepariwisataan.
- Bayu Suryaningrat. 1980. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Aksara Baru: Jakarta. Hal 47
- Bagir Manan. 2001. Menyonsong Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum. FH UII Yogyakarta.
- Budi Winarno, 2008, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Medio Presindo, hal. 16
- Kansil, C.S.T. Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008: 142).
- Darmawan, Deni. Metode Penelitian Kuantitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2013:163
- Franciscus Van Ylst. 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal 6
- Garna, Judistira K. 1996. Ilmu Ilmu Sosial, Dasar Konsepsi Posisi. Bandung. Program Pascasarjana Unpad
- Hamidy, Kesenian Jalur di Rantau Kuantan (Pekanbaru: Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau, 2005) hlm.39-40.
- Hesel Nogi Tangkilisan, 2003, Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Lukman Offset, hal. 19
- Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara.

Kamus Dewan (2005). Edisi Keempat. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2018

Kencana, 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama: Bandung. Hal 24.

Lukman Ali, dkk., 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1044

Munasef. 1985. Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gunung Agung: Jakarta. Hal 47

Ndraha, Taliziduhu, 2000. Ilmu Pemerintahan (Kybernology), Jakarta : Rineka Cipta.

Riant Nugroho, 2003, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo, hal. 158

Rasyid, Ryass. 2000. Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah. LP3ES. Jakarta.

Riduwan. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta. Bandung. 2013:104

Ridwan, HR.2002. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Rousseau, Jean Jacques. 1986. The Social Contract. Penerjemah, Sumardjo. Jakarta. Erlangga.

Sarundajang. 200<mark>2. A</mark>rus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sitiawan Widagdo, Op Cit, h.143

Suharno. 2009. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta. UNY Press.

Sulchan Yasyin. (1997). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amanah.

Syafiie, Inu Kencana. 1994. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Taliziduhu Ndraha. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta: Jakarta. Hal 7

Thoha, Miftah. 1995. Kepemimpinan Dalam Manajemen. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wahab, Salah. 1996. Manajemen Kepariwisataan. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

W.J.S. Poewadarminta.1966. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).

Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013:8)

Jurnal:

Suandi, I Wayan. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Sulchan Yasyin. (1997). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amanah. Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.1, No. 1 Tahun 2010. Jakarta:Bumi Aksara Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dokumen Pendukung:

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi 2018

http://karyatulisilmiah.com/, diakses tanggal 28 April 2019, pukul 11.25 WIB.

https://www.studioriau.com/, diakses tanggal 28 April 2019, pukul 11.34 WIB.

https://www.riau.go.id/home/content/20/kab-kuantan-singingi

Intagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.